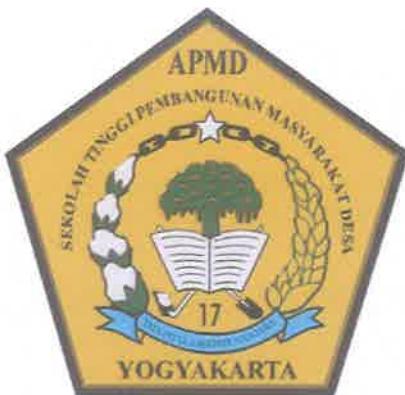


**PEMERINTAH KALURAHAN  
DALAM MELINDUNGI PETANI**

**(Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



Oleh:  
**GERONSIO GRACELLO ADA**  
**21520101**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN  
DALAM MELINDUNGI PETANI**  
**(Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

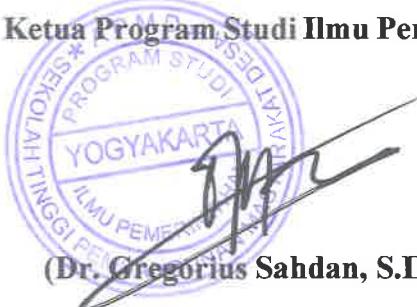
Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geronsio Gracelio Ada

NIM : 21520101

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani (Studi di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juni 2025



Geronsio Gracelio Ada

21520101

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GERONSIO GRACELLO ADA  
NIM : 21520101  
Telp : 082237531006  
Email : [Celloada123@gmail.com](mailto:Celloada123@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani (Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)”** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas penyelenggaraan Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2025



Geronsio Gracello Ada  
21520101

## **MOTTO**

**“Berkat Tuhan Yesus Tiada Yang Mustahil Baginya”**

**“Hambatan Dan Rintangan Yang Datang Anggap Saja Itu Angin Lewat”**

**“Hidupmu Bukanlah Ajang Perlombaan Untuk Orang Lain. Jalanlah di Lintasanmu Sendiri Karena Semua Akan Sampai Ke Tujuan Yang Sama”**

**“Selalu Sabar Akan Apapun Yang Terjadi”**

**“Berikan Apapun Yang Kau Bisa Demi Buat Orang Tua Bahagia”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa terima kasih, dengan kerendahan hati saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu hadir dalam setiap langkah dan pergumulan saya, memberikan ketenangan di tengah tekanan, dan harapan di tengah kesulitan.
2. Untuk Bapa dan Mama tercinta, Yulianus Kaswandi dan Dwi Ayun Nugraheni, dua sosok luar biasa yang menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas doa-doa yang kalian panjatkan setiap hari, bahkan ketika saya tidak mengetahuinya. Terima kasih atas setiap keringat yang kalian teteskan demi memastikan saya bisa terus belajar, melangkah, dan berdiri tegak di dunia ini. Bapa yang selalu memberikan didikan bagi anak laki-laki satu-satunya ini untuk selalu menjadi seorang yang kuat dalam setiap cobaan apapun. Mama yang selalu menguatkan saya meski air mata disembunyikan di balik senyumannya yang indah. Saya tahu, tidak mudah bagi kalian melewati hari-hari penuh pengorbanan demi melihat anakmu bisa menggapai cita-cita. Terima kasih karena kalian memilih untuk menahan lelah demi masa depan saya tanpa harus meminta kembalian apapun dari saya. Bapa dan Mama semoga Kalian selalu sehat, selalu diberkati, dan dilindungi

oleh Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta dan terima kasih, meskipun saya sadar, tak sebanding dengan perjuangan kalian. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan untuk Bapa dan Mama. Jika suatu saat saya bisa membahagiakan kalian, itu adalah doa saya yang paling besar dan harapan hidup saya yang paling tulus. Sekali lagi terima kasih Bapa dan Mama.

3. Untuk kakak saya tercinta, Yuliana Grace Salvera Ada, dan adik saya tersayang, Mariana Priskasari Yeyen Ada. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Kak Vira, terima kasih karena selalu menjadi sosok yang kuat dan menginspirasi, yang tak pernah lelah memberi semangat dalam setiap langkah saya dan terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta sumber motivasi di setiap perjalanan hidup saya. Dan untuk adik Icha, terima kasih atas keceriaan dan perhatian yang selalu menguatkan di saat-saat sulit maupun bahagia. Kehadiran kalian berdua adalah anugerah yang tak ternilai dalam hidup saya, dan saya bersyukur bisa menjalani setiap proses ini dengan dukungan dari keluarga yang luar biasa.
4. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam untuk almarhum Opa Bene dan almarhum Opa Sarwono. Meskipun kini telah berpulang ke hadirat Tuhan, kenangan, nilai-nilai, dan kasih sayang yang mereka tinggalkan akan selalu hidup dalam hati saya. Terima kasih atas segala warisan kebaikan dan keteladanan yang menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sampai hari ini. Untuk Oma Mia dan Oma Sarwono, terima kasih atas

kasih yang tak pernah surut, atas doa yang senantiasa mengiringi langkah saya, serta keteguhan hati yang menjadi sumber kekuatan bagi keluarga. Kehadiran Oma adalah pelita yang terus menerangi dan memberi kehangatan di tengah segala perjuangan. Saya bersyukur dan bangga memiliki kalian dalam hidup saya.

5. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar yang ada di Manggarai maupun di Tanah Jawa. Terima kasih atas segala bentuk doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menguatkan saya dalam setiap langkah. Meskipun jarak memisahkan, namun rasa kekeluargaan, perhatian, dan semangat yang kalian berikan tak pernah surut. Kehadiran kalian, baik secara langsung maupun dalam doa, menjadi bagian penting dari setiap pencapaian dan perjuangan yang saya jalani. Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga besar yang penuh cinta dan kebersamaan.
6. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan, berjalan sejauh ini, dan tidak menyerah meski banyak rintangan yang harus dihadapi. Terima kasih sudah terus berjuang di saat lelah, tetap berdiri di saat terjatuh, dan percaya bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, adalah bagian dari proses yang berharga. Saya bangga pada diriku sendiri, karena telah melalui semua ini dengan keberanian, ketulusan, dan keyakinan. Semoga ke depan, saya terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh syukur.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pemerintah Kalurahan Dalam Memproteksi Petani (Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)*.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu masih memiliki berbagai kekurangan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.I.P., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji I
5. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si selaku dosen penguji II

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan.
7. Pemerintah Kalurahan Girikerto serta masyarakat yang telah memberikan data dan informasi berharga, yang sangat membantu kelancaran penelitian ini.
8. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kampus tercinta: Habib, Yosias, Dio, Anggy, Grit, Agnes, Vidilu, Vagen, Giano, Rido, Gens dan seluruh teman-teman kampus lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu kalian hadirkan dalam setiap proses selama masa kuliah. Kalian bukan hanya teman belajar, tetapi juga bagian dari cerita hidup yang tak terlupakan. Tak lupa, untuk teman seperjuangan dalam perantauan, Riko Bako dan Vito Trivasen, terima kasih telah menjadi saudara dalam perjalanan jauh dari kampung halaman. Kebersamaan, pengertian, dan semangat kalian sangat berarti, menjadi penguatan di tengah suka dan duka selama merantau. Semoga hubungan ini terus terjaga dan menjadi kenangan indah sepanjang hidup.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua teman yang selalu ada bersama saya selama di Jogja. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, pelukan hangat, dan semangat yang kalian berikan, baik di saat suka maupun duka.

Meskipun saya tidak bisa menyebutkan satu per satu, kalian semua memiliki tempat istimewa di hati saya. Kehadiran kalian menjadikan Jogja bukan sekadar tempat singgah, tetapi rumah yang penuh kenangan, pelajaran, dan kasih persaudaraan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini ke depannya.

Penulis  


Geronsio Gracello Ada

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Literatur Review .....	10
G. Kerangka Konsep.....	18
H. Metode Penelitian .....	34
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN GIRIKERTO DAN SUMBER DAYA PERTANIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Kalurahan Girikerto .....	49
B. Kondisi Demografi .....	50
C. Kelembagaan.....	60
D. Visi Misi Kalurahan Girikerto.....	74
E. Potensi Kalurahan Girikerto .....	78
G. Sumber Daya Pertanian.....	79
<b>BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMPROTEKSI PETANI.....</b>	<b>86</b>
A. Ketersediaan Regulasi atau Kebijakan Tentang perlindungan Petani dari Pemerintah Kalurahan .....	86

B. Distribusi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto.....	93
C. Komitmen Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani.....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>112</b>
<b>Panduan Wawancara</b>	
<b>Dokumentasi</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data narasumber Penelitian.....	38
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi wilayah.....	52
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	54
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	55
Tabel 2.4 Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.....	65
Tabel 2.5 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.....	67
Tabel 2.6 Struktur Organisasi Karang Taruna.....	70
Tabel 2.7 Struktur Pengurus BUMKal Girikerto.....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kalurahan Girikerto.....	50
Gambar 2.2 Foto Buah Salak Pondoh dan Lahan Pertanian Salak.....	56
Gambar 2.3 Struktur Pemerintah Kalurahan Girikerto.....	61
Gambar 2.4 Struktur BPKal Kalurahan Girikerto.....	63
Gambar 2.5 Produk Olahan Salak.....	81
Gambar 2.6 Foto Lahan Pertanian Salak.....	81
Gambar 2.7 Foto Lahan Pertanian Umbi-Umbian dan Buah Pepaya.....	82
Gambar 2.8 Foto Lahan Pertanian Cabai dan Sayur-Sayuran.....	83
Gambar 2.9 Foto Lahan Pertanian Sawah.....	84
Gambar 3.1 Foto Tempat Wisata Agro Buah Girikerto.....	96
Gambar 3.2 Foto Wisata Petik Salak Organik di Kalurahan Girikerto.....	103

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam memberikan perlindungan terhadap petani, khususnya dalam mengatasi tantangan pertanian seperti pembangunan infrastruktur irigasi yang belum merata dan memadai, fluktuasi harga hasil panen, menurunnya niat generasi muda dalam pertanian, keterbatasan dalam mengakses pupuk bersubsidi, serta minimnya akses terhadap sarana produksi. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai sentra salak pondoh, banyak petani masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan penghidupan yang layak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan fokus pada tiga aspek utama: ketersediaan kebijakan desa, distribusi sumber daya, dan komitmen pemerintah kalurahan dalam melindungi petani. Narasumber yang diwawancara ada dua belas orang yaitu Lurah Girikerto, Carik, Ulu-ulu, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Dukuh, Ketua Kelompok Tani, pengurus Gapoktan, serta petani salak itu sendiri. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pemerintah Kalurahan Girikerto belum ada peraturan khusus yang secara langsung mengatur tentang perlindungan petani namun pemerintah kalurahan masih berpatokan pada peraturan atau regulasi yang ada di atasnya seperti peraturan mentri pertanian hingga peraturan daerah yang mengatur tentang pertanian. Kedua, mengenai distribusi sumber daya yang dilakukan pihak kalurahan seperti pemberian bibit tanaman, pelatihan teknis, serta penguatan kelompok tani sudah dilakukan atau sudah dijalankan tetapi pemberiannya masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan petani, terutama mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani itu tidak mendapatkan atau merasakannya. Ketiga, Pemerintah kalurahan sebenarnya telah menunjukkan komitmennya, misalnya dengan mengadakan musyawarah atau mengadakan forum-forum terkait pertanian yang mengundang para petani. Namun, musyawarah ini hanya melibatkan petani yang tergabung dalam gapoktan atau kelompok pertanian, sementara petani yang tidak tergabung dalam kelompok tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam melindungi petani masih belum maksimal, karena perhatian lebih banyak diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tertentu. Akibatnya, belum tercipta keadilan dalam penanganan permasalahan pertanian dan juga belum terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh petani yang ada di wilayah tersebut.

***Kata Kunci : Pemerintah, Melindungi, Petani***

## **SUMMARY**

*This study examines the role of the village Girikerto Government, located in Kapanewon Turi, Sleman Regency, in providing protection for farmers, particularly in addressing various agricultural challenges such as inadequate and uneven irrigation infrastructure development, fluctuating crop prices, declining interest among younger generations in farming, limited access to subsidized fertilizers, and insufficient access to production facilities. Although the area is known as a center for salak pondoh (a type of snake fruit), many farmers still struggle to maintain a decent livelihood.*

*This research employs a qualitative-explanatory method, focusing on three main aspects: the availability of village policies, distribution of resources, and the commitment of the village government in protecting farmers. The key informants interviewed include the Lurah (village head) of Girikerto, the Carik (village secretary), Ulu-uluh (village irrigation officer), the Head of the Village Consultative Body (BPKal), local hamlet heads (Dukuh), heads of farmer groups, Gapoktan (farmer group association) administrators, and salak farmers themselves. Data analysis was conducted through stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Data collection techniques used in this research include observation, interviews, and documentation.*

*The findings reveal that, first, the village Girikerto Government has not yet established specific regulations that directly address farmer protection; instead, the village government relies on higher-level regulations, such as those issued by the Ministry of Agriculture or regional regulations concerning agriculture. Second, regarding the distribution of resources, the village has implemented programs such as seed distribution, technical training, and support for farmer groups. However, these initiatives remain limited in scope and have not reached all farmers particularly those not affiliated with any farmer group, who have yet to benefit from them. Third, the sub-district government has actually shown its commitment, for example by holding deliberations or holding agriculture-related forums that invite farmers. However, this deliberation only involves farmers who are members of gapoktan or agricultural groups, while farmers who are not members of groups do not get the same opportunities. This shows that the Girikerto District Government's efforts to protect farmers are still not optimal, because more attention is given to farmers who are members of certain groups. As a result, justice has not been created in handling agricultural problems and there has also not been equal equality for all farmers in the region.*

**Keywords:** *Government, Protection, Farmers*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, terutama di daerah pedesaan. Karena berdasarkan data yang diperoleh dari Sensus Pertanian 2023 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, dengan berbagai jenis usaha pertanian yang dikelola secara individu maupun dalam bentuk rumah tangga usaha pertanian. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Indonesia mencapai 29.342.202 unit, mencerminkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini, sementara jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) tercatat yang secara khusus berprofesi dalam bidang pertanian mencapai 27.368.975 rumah tangga. Jika dikategorikan berdasarkan sektor yang digeluti, mayoritas rumah tangga petani bergerak dalam sektor tanaman pangan dengan 15.550.786 rumah tangga, disusul subsektor peternakan sebanyak 12.046.143 rumah tangga, serta sektor perkebunan yang mencakup 10.877.356 rumah tangga dengan fokus pada komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Data ini menegaskan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia.

Itu sebabnya Pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, baik dalam bentuk pertanian subsisten maupun pertanian komersial, yang mana berkaitan dengan pertanian yang dilakukan

untuk memenuhi pangan dari petani itu sendiri dan pertanian yang dilakuakan untuk menambah keuntungan ekonomi.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan yang subur dan luas, sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian nasional. Kondisi geografis yang mendukung, ditambah dengan iklim tropis, memungkinkan berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan tumbuh dengan baik. Curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian, karena ketersediaan air yang cukup sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Keberagaman jenis tanah serta kesuburnya memungkinkan Indonesia menghasilkan berbagai komoditas pertanian unggulan.

Dengan adanya banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia Tidak mengehrrankan lagi mengapa banyak negara di luar sana yang mau menjajah Indonesia temasuk Belanda dan negara penjajah lainnya, karena Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil bumi yang melimpah, sehingga banyak bangsa asing di masa lalu datang dengan tujuan menguasai kekayaan tersebut. Berbagai hasil bumi, seperti rempah-rempah, emas, minyak bumi, serta komoditas berharga lainnya, menjadi daya tarik utama yang mendorong negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk menjajah Nusantara. Rempah-rempah berkualitas tinggi, seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar dunia, sehingga memicu persaingan antarbangsa dalam mengendalikan perdagangan di wilayah ini. Selain itu, kekayaan tambang seperti emas, batu

bara, dan minyak bumi juga menjadi alasan utama bangsa asing berusaha menguasai Indonesia. Kehadiran para penjajah tidak hanya berdampak pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Keberagaman hasil pertanian yang dihasilkan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang mendukung aktivitas bercocok tanam sejak lama. Hingga saat ini, pertanian tetap menjadi sektor vital bagi banyak penduduk, terutama di daerah pedesaan, yang mengandalkan lahan sebagai sumber utama mata pencarian.

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pertanian tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur irigasi, karena pada dasarnya sebuah pertanian ataupun perkebunan itu butuh yang namanya air untuk keberlangsungan hidup tanaman. Irigasi berperan dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Tanpa sistem irigasi yang baik, lahan pertanian akan mengalami kekeringan, sehingga produktivitas tanaman menurun drastis.

Secara khusus, di beberapa wilayah, termasuk Yogyakarta, sistem irigasi telah menjadi instrumen penting dalam mendukung para petani sejak dahulu. Salah satu contoh pembangunan irigasi di daerah ini adalah Selokan Mataram, yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tujuan utama dari pembangunan irigasi ini adalah untuk memastikan bahwa lahan pertanian di Yogyakarta tetap mendapatkan pasokan air yang cukup, sehingga dapat terhindar dari kekeringan. Dengan

adanya sistem irigasi ini, aktivitas pertanian dapat terus berjalan dengan lancar, mengingat mayoritas masyarakat di wilayah tersebut bekerja sebagai petani.

Itu sebabnya pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan peraturan baru mengenai irigasi air yang terbaru, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Undang-undang terbaru yang mengatur pengairan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 yang memberikan panduan mengenai pengelolaan air irigasi.

Tapi sampai dengan saat ini sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur irigasi. Meskipun irigasi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian, kenyataannya masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses irigasi yang memadai. Akibatnya, para petani kesulitan dalam mengelola lahan mereka, terutama dalam hal pengairan, yang berdampak langsung pada hasil panen. Ketidakmerataan infrastruktur irigasi menyebabkan sebagian besar petani masih bergantung pada curah hujan, sehingga produksi pertanian menjadi tidak stabil dan rentan terhadap musim kemarau. Padahal, ketersediaan air yang cukup merupakan faktor utama dalam memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini muncul isu mengenai menurunnya jumlah petani di sektor pertanian. Generasi muda, khususnya kaum milenial, semakin kurang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian,

terutama pertanian tradisional. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa profesi petani tidak memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan.

Seperti pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Teddy Prasetyawan dalam Jurnal Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, (2024) yang mana menjelaskan bahwa Saat ini, jumlah petani di Indonesia terus menurun, dan semakin sedikit generasi muda yang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah petani dalam sepuluh tahun terakhir turun 7,42%, dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2023. Mayoritas petani saat ini didominasi oleh generasi yang lebih tua, dengan 42% berasal dari generasi X (usia 43–58 tahun). Jumlah petani berusia 55–64 tahun naik 3,29%, sementara petani berusia di atas 65 tahun meningkat 3,4%. Sebaliknya, jumlah petani milenial terus menurun. Proporsi petani berusia 25–34 tahun turun 1,73% menjadi 10,24%, dan petani berusia 35–44 tahun berkurang 4,34% menjadi 22,0%. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. (Prasetyawan, 2024).

Selanjutnya berdasarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan bahwa jumlah petani di Indonesia terus menurun setiap tahun. Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa semakin sedikit orang yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Salah satu penyebab utamanya adalah upah harian yang rendah, sekitar Rp55.503 per hari. Selain itu, kurangnya jenjang karier, risiko tinggi, pendapatan yang tidak

stabil, kurangnya penghargaan terhadap profesi petani, serta prospek yang dianggap tidak menjanjikan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan generasi muda semakin menjauh dari bidang pertanian. (Anggela, 2024)

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Semua tingkatan pemerintahan harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan solusi yang efektif guna mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Pemerintah pusat dapat mengambil peran dalam menyusun kebijakan strategis, seperti memberikan insentif bagi para petani, meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian, serta memperbaiki sistem irigasi dan infrastruktur pertanian.

Secara spesifik dalam konteks wilayah Yogyakarta secara khusus di Kalurahan Girikerto, yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, menjadikannya sebagai aktivitas utama dalam perekonomian lokal. Salah satu komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan di wilayah ini adalah salak pondoh, yang telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani. Namun, dalam praktiknya, para petani di daerah ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sistem pengairan. Permasalahan irigasi menjadi perhatian utama karena berdasarkan observasi yang dilakukan, pembangunan infrastruktur irigasi yang ada di Kalurahan Girikerto masih belum merata. Masih banyak lahan pertanian yang belum tersentuh oleh

pembangunan irigasi. Keterbatasan dan ketidak merataan pembangunan irigasi ini berdampak pada hasil panen, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan para petani.

Dalam hasil observasi pengamatan yang dilakukan, ditemukan juga kehidupan sebagian para petani yang ada di Kalurahan Girikerto terbilang cukup memprihatinkan, terutama dalam hal kestabilan penghasilan dan akses terhadap sarana produksi pertanian. Meskipun Kalurahan Girikerto dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil salak, kenyataannya tidak semua petani mampu menikmati hasil pertanian secara optimal. Beberapa di antaranya masih menghadapi kendala seperti naik turun harga hasil panen, kurangnya pendampingan teknis, keterbatasan dalam mengakses pupuk bersubsidi, serta minimnya perlindungan terhadap risiko gagal panen. Hal ini berdampak pada aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kondisi tempat tinggal. Masih dijumpai rumah-rumah petani yang tergolong tidak layak huni, dengan bangunan semi permanen dan fasilitas pertanian seperti traktor, alat pengangkas, alat pengangkut dan berbagai fasilitas lainnya yang minim. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani belum sepenuhnya terjamin, meskipun mereka berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji spesifik bagaimana pemerintah memproteksi ataupun melindungi warga terutama para petani sehingga petani punya semangat untuk bertani, ada perlindungan dari sisi ekonomi yang mana petani aman dari sisi ekonomi dan terwujudnya

kesejahteraan bagi petani. Dengan kajian ini peneliti pengangkat judul yaitu **“Pemerintah Kalurahan Dalam Memproteksi Petani”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka Peneliti dapat menarik benang merah sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana Pemerintah Kalurahan dalam Memproteksi Petani di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta ?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kali ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Ketersediaan Kebijakan tentang perlindungan petani dari pemerintah Kalurahan.
2. Distribusi sumber daya alam oleh pemerintah Kalurahan.
3. Komitmen pemerintah Kalurahan dalam melindungi petani.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kalurahan dalam memproteksi petani di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari segi kebijakan, distribusi bantuan, pendampingan kelembagaan, maupun upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup petani serta meningkatkan

kesejahteraan mereka di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Pemerintah Kalurahan Dalam Memproteksi Petani memberikan sejumlah manfaat salah satunya yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah desa atau kalurahan dalam sektor pertanian. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti kebijakan perlindungan terhadap petani, tata kelola sumber daya desa, serta dinamika antara kelembagaan desa dan masyarakat tani.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Kalurahan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan serta program kerja yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, gagal panen, dan akses terhadap bantuan.

b. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam berinteraksi dengan pemerintah desa dan mendorong partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada sektor pertanian.

c. Bagi Publik

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan serta perlunya dukungan kolektif terhadap upaya perlindungan mereka. Dengan mengetahui kondisi riil yang dihadapi petani dan upaya pemerintah kalurahan dalam memproteksi mereka, publik diharapkan dapat lebih peduli, terlibat dalam isu-isu pertanian lokal, serta mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani.

## F. Literatur Review

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Aminah, Sumardjo, Djuara Lubis, dan Djoko Susanto yang dimuat dalam Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 3, Tahun 2015 yang berjudul Strategi Peningkatan Keberdayaan Petani Kecil Menuju Ketahanan Pangan. tingkat keberdayaan petani kecil masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kualitas dalam penyelenggaraan program, peran pendamping atau penyuluhan yang belum optimal, serta terbatasnya akses dan dukungan dari lingkungan. Selain itu, karakteristik petani kecil sendiri juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberdayaan mereka. Rendahnya keberdayaan petani kecil ini berdampak langsung pada ketahanan

pangan keluarga mereka. Karena keterbatasan dalam berbagai aspek, petani kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Akibatnya, hasil panen yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga ketahanan pangan mereka menjadi lemah. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kesejahteraan petani kecil akan semakin terancam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang efektif guna meningkatkan keberdayaan petani kecil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas penyelenggara program, penguatan peran pendamping atau penyuluh, serta perluasan akses dan dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, proses pembelajaran bagi petani kecil juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih memahami teknik pertanian yang lebih baik dan efisien. Dengan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan keberdayaan petani kecil dapat meningkat. Jika petani memiliki keterampilan yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, maka ketahanan pangan keluarga mereka juga akan membaik. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani kecil serta keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim, Heru Permana, dan Hilman yang dimuat dalam Jurnal JAPS, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2024 yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), studi Kasus dPerlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkurangnya lahan pertanian

disebabkan oleh banyaknya kelonggaran dalam alih fungsi lahan. Kelonggaran ini muncul karena perencanaan tata ruang di daerah yang belum sepenuhnya melindungi lahan pertanian. Selain itu, aturan mengenai tata ruang di daerah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu faktor utama yang mengatur tata ruang dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi. Akibatnya, kepentingan pembangunan dan investasi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya menjaga lahan pertanian agar tetap berfungsi. Kurangnya perlindungan terhadap lahan pertanian ini membuat proses alih fungsi lahan semakin sulit dikendalikan. Banyak lahan produktif yang akhirnya berubah menjadi kawasan industri, pemukiman, atau infrastruktur lain yang mendukung investasi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka luas lahan pertanian akan semakin menyusut, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian agar lahan pertanian tetap terjaga dan tidak semakin berkurang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Viki Nisfan yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Volume 7, Nomor 1, tahun 2022 yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kertamukti telah berperan cukup baik dalam mendukung masyarakat,

meskipun masih ada beberapa aspek yang belum maksimal. Khususnya dalam peran sebagai fasilitator dan katalisator, masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal perhatian terhadap bantuan modal bagi petani. Kurangnya dukungan modal ini membuat petani menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Selain itu, pemerintah desa juga belum optimal dalam menyelenggarakan pelatihan bagi petani. Pelatihan yang seharusnya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani masih jarang dilakukan, sehingga petani kesulitan untuk mengembangkan teknik pertanian yang lebih efektif dan efisien. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya, namun dukungan yang lebih intensif masih sangat dibutuhkan. Jika pemerintah desa lebih aktif dalam memberikan bantuan modal serta meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan, maka petani akan lebih berdaya dalam mengelola lahan mereka. Dengan begitu, kesejahteraan petani di Desa Kertamukti bisa lebih meningkat dan sektor pertanian di daerah tersebut dapat berkembang dengan lebih baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmar, Mappamiring, Anwar Parawangi yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 2, tahun 2016, yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berperan dalam memberdayakan petani padi di Desa Parumpanai, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Petani di desa ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal bantuan bibit dan pupuk yang seharusnya dapat

meningkatkan hasil pertanian mereka. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya upaya pemerintah desa dalam menyediakan bibit unggul dan pupuk ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi lahan pertanian setempat. Ketersediaan bibit berkualitas serta pupuk yang terjangkau sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, hingga saat ini, petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya tersebut. Jika pemerintah desa lebih aktif dalam mencari solusi, seperti menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk mendapatkan bibit dan pupuk yang lebih baik, maka hasil pertanian di Desa Parumpanai bisa lebih optimal. Dengan dukungan yang tepat, petani akan lebih berdaya dalam mengelola lahan mereka, sehingga produksi pertanian di desa ini dapat meningkat dan kesejahteraan petani juga ikut membaik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftahfarid, yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP), Volume 10, Nomor 2 Tahun 2022, yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Kota Bangun Ilir telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam upaya pemberdayaan petani di wilayahnya. Salah satu indikator keberhasilan ini terlihat pada tahap kesadaran, di mana kepala desa secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petani. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah pelatihan mengenai cara pemberian vitamin pada tanaman. Pelatihan ini dinilai efektif karena memberikan pemahaman kepada petani

tentang pentingnya menjaga kualitas tanaman guna meningkatkan hasil panen. Selain itu, pada tahap transformasi sosial, kepala desa juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui berbagai program yang telah dirancang, petani diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dasar dalam mengelola lahan pertanian, khususnya dalam budidaya padi. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan petani mampu berkontribusi lebih dalam sektor pertanian, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada tahap peningkatan, kepala desa juga telah mengadakan berbagai program pendukung, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan pertanian. Program ini bertujuan untuk membentuk inisiatif serta meningkatkan kreativitas dan inovasi petani agar lebih mandiri dalam mengelola usaha pertanian mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa petani masih kurang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang disediakan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mengembangkan program-program pemberdayaan yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mencari solusi terhadap kendala anggaran agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.

Berbagai penelitian yang telah dibahas sebelumnya memiliki fokus berbeda dalam menyoroti peran pemerintah dan tantangan yang dihadapi petani

dalam meningkatkan keberdayaan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Aminah dan rekan-rekannya menyoroti rendahnya keberdayaan petani kecil akibat lemahnya penyelenggaraan program, kurangnya pendampingan, serta terbatasnya akses dan dukungan lingkungan. Penelitian ini menawarkan solusi berupa peningkatan kualitas program, penguatan pendamping, dan perbaikan proses pembelajaran bagi petani agar mereka lebih mandiri dalam mengelola pertanian. Di sisi lain, penelitian yang membahas peran Kepala Desa Kota Bangun Ilir lebih berfokus pada bagaimana pemimpin desa membantu petani melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Meskipun berbagai program telah dijalankan, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemberdayaan petani. Sementara itu, penelitian tentang kebijakan tata ruang membahas penyusutan lahan pertanian akibat kelonggaran regulasi yang lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi dibandingkan perlindungan lahan pertanian. Penelitian lain mengenai peran pemerintah desa di Kertamukti menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam mendukung petani, pemerintah desa masih kurang maksimal dalam menyediakan bantuan modal dan pelatihan.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, dukungan desa, hingga akses terhadap modal dan pelatihan. Meskipun memiliki fokus berbeda, semuanya menegaskan pentingnya peran

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat.

Persamaan dari Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang pemberdayaan petani, baik melalui peran kepala desa, regulasi tata ruang, maupun program-program pemerintah desa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Aminah dan rekan-rekannya menyoroti rendahnya keberdayaan petani kecil akibat lemahnya pendampingan dan akses terhadap sumber daya. Sementara itu, penelitian tentang Kepala Desa Kota Bangun Ilir lebih menekankan bagaimana pemimpin desa membantu meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, ada penelitian yang membahas dampak kebijakan tata ruang terhadap penyusutan lahan pertanian, di mana kebijakan pusat lebih menitikberatkan pada investasi dibandingkan perlindungan lahan petani.

Sementara itu, penelitian ini yang peneliti buat memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu bagaimana pemerintahan kalurahan Kalurahan Girikerto Memproteksi petani dalam hal ini mengangkat isu infrastruktur irigasi. Proteksi di sini lebih menekankan pada upaya perlindungan petani agar mereka tetap dapat menjalankan usaha pertanian dengan baik, terutama dalam menghadapi tantangan terkait infrastruktur irigasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti pemberdayaan petani secara umum, penelitian ini lebih mengarah pada peran kebijakan lokal dalam mempertahankan akses air air bagi pertanian.

Selain itu, penelitian yang ini memiliki konteks wilayah yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, khususnya di daerah Sleman yang dikenal memiliki potensi pertanian tinggi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi petani di daerah ini, terutama terkait irigasi, bisa berbeda dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian Anda dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian, peran pemerintah yang dianalisis, serta konteks wilayah dan tantangan utama yang dihadapi petani. Jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti pemberdayaan petani secara umum, penelitian Anda lebih menitikberatkan pada aspek proteksi petani melalui kebijakan pemerintah Kalurahan terkait infrastruktur irigasi.

## G. Kerangka Konsep

Dalam membahas tentang permasalahan secara menyeluruh di atas maka diperlukannya sebuah kerangka konsep. Berikut beberapa konsep yang peneliti buat:

### 1. Pemerintah

Dalam konsep pemerintahan, terdapat dua istilah penting yang sering digunakan, yaitu *governance* dan *government*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *governance* berarti pemerintahan, sedangkan *government* diartikan sebagai pemerintah. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan suatu negara atau wilayah, kedua istilah ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda. *Government* lebih berfokus pada pihak atau subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

menjalankan kebijakan dalam suatu badan atau instansi. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menyusun peraturan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah terdiri dari berbagai institusi formal, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang menjalankan fungsi masing-masing dalam tata kelola negara. Di sisi lain, *governance* lebih menekankan pada tata kelola atau sistem pengelolaan pemerintahan itu sendiri. Istilah ini mengacu pada mekanisme, kebijakan, serta proses yang digunakan untuk mengatur suatu negara, termasuk keterlibatan berbagai aktor, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pembuatan pemerintah (*government making*) merupakan gagasan dan teori yang dikedepankan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, yang kemudian rayakan sebagai Mazhab Timoho. Sebagai tubuh pengetahuan, *government making* itu, didekati dan dibentuk dengan lima konsep besar: *government(G1)*, *governing(G2)*, *governability(G3)*; *governance(G4)*, dan *governmentality(G5)*. Dalam konsep ke dua tentang *Governing* ini bisa dikatakan sebagai perbuatan pemerintah atau bisa dikatakan sebagai kata kerja memerintah di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan, karena

menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. (Eko, 2021).

Dalam hal pemerintah sebagai fungsi proteksi ini dimana pemerintah juga harus mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, pemerintah harus memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, ekonomi, lingkungan, serta hak-hak dasar masyarakat.

Menurut Sugiman pada umumnya, yang disebut dengan "pemerintah" adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan pemerintahan administrasi meliputi yang tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Sugiman, 2018)

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dengan membuat kebijakan yang melindungi mereka dari berbagai ancaman. Misalnya, dalam sektor pertanian, pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada petani agar mereka tidak mengalami kerugian akibat bencana alam atau kebijakan yang merugikan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dengan adanya perlindungan dari pemerintah, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan sejahtera. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya untuk kepentingan tertentu.

Menurut Sutoro Eko memahami pemerintahan secara luas sebagai fenomena sosial yang tidak hanya berpusat pada institusi atau aktor yang berkuasa. Pemerintahan bukan sekadar kumpulan lembaga negara, aparat birokrasi, atau aktivitas administratif yang berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap hajat hidup orang banyak, serta relasi kuasa yang terjadi di antara mereka. Dalam perspektif ini, pemerintahan bukan hanya soal negara yang mengatur rakyatnya, tetapi

juga mencakup bagaimana berbagai kelompok masyarakat, organisasi sosial, dan pihak swasta turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola sumber daya. Dengan kata lain, pemerintahan tidak hanya bersifat hierarkis dari atas ke bawah, tetapi juga berlangsung secara horizontal melalui interaksi antara berbagai aktor dalam masyarakat. Pemerintahan adalah fenomena kompleks yang mencakup gagasan, arena, aktor, institusi, proses, dan kekuasaan. (Eko, 2021)

Membahas mengenai pemerintah dalam masyarakat itu sendiri yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekadar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna ordering the state) melainkan memerintah negara (governing the state) agar “negara hadir” (meminjam kosakata Presiden Joko Widodo) memberikan distribusi dan proteksi kepada warga, sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum.(Eko, 2021) Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pemerintah hadir salah satunya untuk mendistribusikan dan melindungi segenap masyarakat yang ada.

Selain itu Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Dalam pemerintahan, terdapat empat unsur utama yang meliputi pemerintah, rakyat, wilayah, dan kekuasaan. Tujuan utama dari pemerintahan yaitu memastikan pengelolaan negara dan masyarakat

berjalan dengan baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas dan ketertiban. (Noviati, 2016)

Pemerintahan juga menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang harus berlandaskan prinsip demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Selain itu, pemerintahan dituntut untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Berdasarkan komponennya Pemerintahan terdiri dari berbagai elemen yang saling berperan dalam menjalankan fungsinya. Komponen pertama yaitu legislatif, yang bertugas merancang serta menetapkan undang-undang atau kebijakan, seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Selanjutnya, eksekutif memiliki peran dalam melaksanakan undang-undang serta kebijakan yang telah ditetapkan, yang dijalankan oleh presiden, kementerian, dan pemerintah daerah. Sementara itu, yudikatif bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta menyelesaikan berbagai sengketa hukum, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga peradilan lainnya. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa fungsi dari pemerintahan itu sendiri yaitu Melindungi, mengatur, melayani, dan mendistribusikan.

### 1. Fungsi Melindungi

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat sudah menjelaskan secara jelas bahwa tujuan dari negara Indonesia itu sendiri salah satunya adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mana ini berarti pemerintah hadir untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, serta hak-hak warga negara. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan nasional, hak asasi manusia, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera tanpa adanya ancaman yang mengganggu kehidupan mereka.

### 2. Fungsi Mengatur

Pemerintah sebagai fungsi mengatur berarti pemerintah memiliki peran dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan aturan atau kebijakan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan politik, guna memastikan bahwa kehidupan bernegara berjalan dengan baik dan harmonis. Melalui regulasi,

pemerintah mengatur berbagai hal, seperti sistem pemerintahan, hubungan antarwarga, kebijakan pembangunan, serta perlindungan hak dan kewajiban masyarakat. fungsi mengatur ini bertujuan agar kehidupan masyarakat tetap tertata, tertib, dan sesuai dengan hukum serta norma yang berlaku.

### 3. Fungsi Melayani

Pemerintah sebagai fungsi melayani berarti pemerintah bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Fungsi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta pelayanan publik lainnya. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang diberikan mudah diakses, cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Fungsi melayani juga mencerminkan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

### 4. Fungsi Mendistribusikan

Pemerintah sebagai fungsi mendistribusikan berarti pemerintah berperan dalam mendistribusikan sumber daya, barang, atau jasa kepada masyarakat secara adil dan merata. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan hak serta akses yang sama terhadap berbagai fasilitas dan layanan. Melalui fungsi ini,

pemerintah memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Dengan distribusi yang adil, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan tingkatannya pemerintah juga terbagi atas beberapa tingkatan yang mana Pemerintahan Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dan menganut sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pemerintahan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan desa.

- a. Pemerintah pusat, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, serta kementerian-kementerian, bertanggung jawab atas kebijakan nasional. Sementara itu,
- b. pemerintah daerah mencakup provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dengan tugas utama menjalankan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Di tingkat paling bawah, pemerintah desa atau kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan lokal dengan dukungan dana desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka menurut saya pemerintah sebagai entitas yang memiliki otoritas, pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai fungsi kenegaraan guna memastikan

kesejahteraan masyarakat. Salah satu tugas utama pemerintah adalah membuat serta mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Melalui berbagai regulasi serta penegakan hukum yang tegas, pemerintah dapat mencegah serta menangani berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

## **2. Proteksi**

Dalam jurnal *Of Business Inflation Management And Accounting* (2025) yang mana menjelaskan Proteksi perdagangan merujuk pada serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri domestik dari kompetisi asing yang dianggap dapat merugikan. Tujuan utama proteksi perdagangan adalah untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi domestik dengan mengurangi ketergantungan pada impor, melindungi pasar lokal, dan memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang tanpa ancaman dari barang-barang murah yang diimpor. Konsep ini mencakup berbagai alat kebijakan yang digunakan negara, termasuk tarif impor, kuota impor, serta hambatan non-tarif seperti subsidi, regulasi, dan manipulasi mata uang. Menurut Neil

Vousden, proteksionisme dapat diwujudkan melalui berbagai langkah yang menghambat aliran barang dari luar negeri. Proteksi perdagangan bertujuan untuk memastikan bahwa produk dalam negeri tetap dapat bersaing di pasar domestik dan internasional tanpa terganggu oleh praktik perdagangan tidak adil, seperti dumping atau kebijakan perdagangan yang merugikan negara pengimpor. Dalam kerangka globalisasi yang semakin berkembang, proteksi perdagangan dapat digunakan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi negara. Meskipun globalisasi mempromosikan pasar bebas, tidak semua negara siap untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi besar yang lebih efisien. Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme tetap relevan di banyak negara yang berusaha melindungi sektor-sektor industri tertentu, terutama sektor manufaktur yang masih berkembang (Anisah et al., 2025).

Kata proteksi ini sudah terlahir dari dahulu yang mana dikenal dengan Proteksionisme merupakan kebijakan yang lahir dari pemikiran merkantilisme, yang sudah dipraktikkan sejak berabad-abad lalu. Kebijakan ini merupakan turunan dari merkantilisme yang berasumsi bahwa perlu adanya peran pemerintah untuk menerapkan regulasi dan kontrol terhadap perdagangan dalam upaya mencapai kekayaan dan kekuasaan. (Sari et al., 2014).

Itu berarti kebijakan perlindungan ini juga diterapkan dalam bidang lain, seperti lingkungan, di mana pemerintah dan organisasi tertentu menerapkan berbagai kebijakan guna menjaga kelestarian alam. Secara umum, dengan kata lain perlindungan ini mencakup berbagai strategi dan

kebijakan yang diterapkan untuk memastikan keberlangsungan suatu aspek, baik dalam skala individu, bisnis, maupun pemerintahan.

Di Indonesia sendiri proteksi atau perlindungan ini sudah tertera juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana tertera jelas dalam alinea ke empat bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu berarti pemerintah hadir untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, serta hak-hak warga negara. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan nasional, hak asasi manusia, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera tanpa adanya ancaman yang mengganggu kehidupan mereka.

Adapun Indikator pemerintah sebagai fungsi proteksi dapat dilihat dari berbagai aspek yang menunjukkan upayah dalam perlindungan terhadap masyarakat antara lain itu seperti perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang mencakup regulasi yang melindungi hak warga negara, penegakan hukum yang adil, serta keberadaan lembaga seperti Komnas HAM. Dalam aspek keamanan dan ketertiban, pemerintah harus memastikan keberadaan aparat penegak hukum, pencegahan kejahatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Selain itu, perlindungan sosial dan ekonomi juga menjadi indikator penting, seperti adanya jaminan sosial (BPJS), bantuan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan yang adil. Pemerintah juga berperan dalam mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan melalui

kebijakan pengurangan risiko bencana, program perlindungan ekosistem, serta respons cepat terhadap bencana alam.

Berdasarkan uraian di atas saya mengambil sebuah pengertian bahwa kata proteksi ini merupakan sebuah arti dari kata perlindungan yang mana proteksi ataupun perlindungan ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan di berbagai sektor. Tanpa adanya proteksi yang memadai, kelangsungan suatu pekerjaan atau aktivitas dalam sektor tertentu dapat terhambat oleh berbagai risiko dan ancaman. Perlindungan berfungsi sebagai upaya pencegahan agar sektor-sektor tersebut tetap berjalan dengan stabil dan efisien. Jika proteksi tidak diterapkan, berbagai gangguan dapat muncul, yang berpotensi menghambat produktivitas dan perkembangan. Oleh sebab itu, penerapan proteksi atau perlindungan yang tepat sangat diperlukan agar setiap sektor dapat terus beroperasi tanpa kendala yang berarti, serta mampu mencapai tujuan jangka panjangnya dengan lebih baik.

Selain itu berkaitan dengan kata proteksi berarti ada wujud yang dilakukan dan dijadikan sebagai instrumen perlindungan yaitu adanya sebuah kebijakan atau ada produk kebijakan, tidak hanya itu perlindungan diukur atau dilihat dari kehadiran pemerintah setiap waktu terhadap permasalahan masyarakat, dan juga diukur dari pemerintah itu mampu menggunakan kekuasaan untuk mengontrol dalam hal ini terutama dalam hal-hal yang merugikan pihak petani. Ini juga akan menjadi fokus yang diteliti pada penelitian ini.

### **3. Petani**

Istilah ”petani” dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Moore dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* (1966) mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. (Izzaty et al., 2014)

Menurut Claudia Olvi (2017) Petani adalah individu yang bekerja di bidang pertanian dengan bercocok tanam pada lahan pertanian. Secara umum, petani sering diartikan sebagai seseorang yang menanam komoditas pertanian dan menjual hasilnya ke pasar. Namun, perspektif mengenai petani tidak hanya terbatas pada aspek produksi, tetapi juga mencakup berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang beragam. Menurut Rodjak (2002), petani adalah seseorang yang mengelola tanaman atau beternak dengan tujuan memperoleh penghidupan. Sebagai pengelola usahatani, petani harus mampu mengambil keputusan strategis dalam pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Menurut A.T. Mosher ( dalam Sari : 2019) juga membagi pertanian dalam dua golongan, yaitu pertanian primitif dan pertanian modern. Pertanian primitif diartikan sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari orang- orang tua dan tidak menerima pemberitahuan (inovasi). Mereka yang mengharapkan bantuan alam untuk mengelolah pertaniannya. Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta dapat menerima pembaruan (inovasi) dalam bidang pertanian. Petani macam inilah yang dapat berkembang dalam rangka menunjang ekonomi baik dibidang pertanian maupun dibidang- bidang lainnya (Sari, L.2 019).

Menurut Basri Marzuki (2024) mengatakan bahwa petani adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola serta mengusahakan lahan pertanian guna menghasilkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti bahan pangan, serat, dan produk lainnya. Dalam praktiknya, profesi ini mencakup serangkaian aktivitas, mulai dari menyiapkan lahan, menanam, merawat tanaman, hingga proses panen dan pasca-panen. Sebagai pekerja di sektor pertanian, petani memiliki peran utama dalam menanam beragam komoditas, termasuk padi, buah-buahan, sayuran, dan bunga. Hasil yang diperoleh dari pertanian ini dapat dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi maupun dijual kepada masyarakat luas. Seorang petani yang profesional senantiasa berupaya meningkatkan keterampilan dan teknik bertani agar produktivitas lahan yang dikelola semakin optimal.

Adapun beberapa jenis petani berdasarkan Basri Marzuki yaitu meliputi Petani Berdasi, Petani Gurem, Petani Monokultur, Dan Petani Penggarap. Petani Berdasi itu lebih cendrung merujuk kepada pemilik lahan yang tidak menggarap sendiri pertaniannya, Petani Gurem itu petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar, Petani Monokultur itu petani yang bisa dibilang hanya menanam satu jenis tanaman saja, dan petani Penggarap itu lebih ke petani yang menggarap lahan orang lain dengan pembagian sistem bagi hasil. (Basri Marzuki, 2024)

Profesi ini telah lama menjadi tulang punggung ketahanan pangan suatu wilayah, memastikan ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat. Petani tidak hanya berfokus pada penanaman tanaman pangan seperti padi, jagung, atau sayuran, tetapi juga mencakup budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura. Selain itu, petani sering kali terlibat dalam pemeliharaan ternak yang mendukung sektor pertanian secara lebih luas. Dalam menjalankan aktivitasnya, petani bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, ketersediaan air irigasi, serta akses terhadap pupuk dan teknologi pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa petani adalah individu yang memiliki atau tidak memiliki lahan pertanian, yang bekerja di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Petani berperan sebagai pilar utama dalam sektor perdagangan di Indonesia. Tanpa keberadaan petani, sektor pertanian dan perekonomian yang bergantung pada pertanian akan mengalami penurunan. Oleh karena itu,

keberadaan petani sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pasokan pangan yang cukup bagi masyarakat. Dengan demikian, petani memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di negara ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif Eksplanatif yang mana, menurut Ulber Silalahi (dalam Silalhi: 2017), penelitian eksplanatif adalah metode yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa, tetapi juga berupaya menguraikan hubungan sebab-akibat yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, penelitian eksplanatif berfokus pada analisis mendalam mengenai alasan di balik suatu kejadian serta bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhinya. Metode penelitian ini menjelaskan sebab terjadinya sebuah peristiwa dengan melihat hubungan antar dua atau lebih variabel (Silalahi, 2017).

Teks eksplanasi merupakan jenis teks yang berfokus pada penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa, baik yang berkaitan dengan bencana alam, fenomena sosial, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari teks ini adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai faktor penyebab dan tahapan yang terjadi dalam sebuah

fenomena. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi dirancang untuk menjawab pertanyaan seperti “mengapa suatu kejadian bisa berlangsung?” dan “bagaimana prosesnya terjadi?”. Dengan demikian, teks ini memiliki struktur yang sistematis, mulai dari pernyataan umum mengenai topik yang dibahas, deretan penjelasan terkait sebab akibat, hingga kesimpulan yang merangkum keseluruhan isi teks. Isi teks eksplanasi mampu menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi (Khaeroh et al., 2020).

Menurut B. Suyanto dan Satinah yang mana menjelaskan penelitian eksplanatif ini biasanya dilakukan seorang peneliti untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang apakah perubahan kuantitas/kualitas suatu variabel seiring atau memengaruhi perubahan kuantitas/kualitas variabel yang lain. Penelitian eksplanatif yang sederhana biasanya hanya menguji kekuatan hubungan dua variabel. Tetapi, dengan pertimbangan mutu yang ingin diraih, tak jarang penelitian eksplanatif menguji hubungan antara tiga atau empat variabel, atau bahkan lebih (Suyanto & Satinah, 2022).

Secara Spesifik penelitian eksplanatif ini meneliti apa yang sudah diteliti orang karena pada dasarnya tujuan eksplanatif ini yaitu mencari makna dari setiap peristiwa sehingga sehingga nanti akan menghasilkan kajian baru dari peristiwa yang sama.

Oleh karena itu dalam mengetahui bagaimana pemerintah Kalurahan Dalam Memproteksi Petani di kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta maka jenis penenelitian yang digunakan

dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Kualitatif Eksplanatif karena mampu menggali secara mendalam bagaimana pemerintah Kalurahan Girikerto menjalankan perannya dalam melindungi petani, khususnya dalam menghadapi tantangan terkait infrastruktur irigasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kebijakan, implementasi program, serta komitemen pemerintah kalurahan terhadap petani. Melalui metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Eksplanatif dalam penelitian ini berarti bahwa hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang ada, tetapi juga menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, serta sejauh mana efektivitasnya.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Menurut Salma (2023), Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian menjadi hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian. Mengapa penting? Sebab dengan mengetahui subjeknya, peneliti dapat mengetahui apa atau siapa yang akan memberikan peneliti data dan informasi. Mudahnya begini, kalau peneliti hendak melakukan penelitian, maka sebelumnya dipastikan sudah memiliki data

awal, yang membuat mereka memilih topik tersebut untuk diteliti. Sumber data awal penelitian ini bisa menjadi subjek.

Subjek penelitian dapat terdiri dari tiga level, yaitu:

- Mikro merupakan level terkecil dari subjek penelitian, dan hanya berupa individu.
- Meso merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak, misal keluarga dan kelompok.
- Makro merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, seperti masyarakat atau komunitas luas. (Salma, 2023)

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber adalah teknik purposif. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk langsung menunjuk narasumber yang dianggap paling relevan dengan topik penelitian. Penunjukan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga narasumber yang dipilih benar-benar memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, teknik ini juga mempertimbangkan persetujuan dari narasumber sebelum mereka diwawancara atau dimintai informasi. Dengan demikian, proses pemilihan narasumber menjadi lebih efektif dan dapat memberikan data yang lebih akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian berjudul “Pemerintah Kalurahan dalam Memroteksi Petani”, subjek penelitian mencakup berbagai pihak yang memiliki peran langsung dalam kebijakan perlindungan terhadap petani. Pemerintah

kalurahan, termasuk lurah dan perangkat desa, menjadi aktor utama dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, petani lokal yang merasakan dampak kebijakan tersebut juga menjadi subjek penelitian karena pengalaman dan pandangan mereka dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas perlindungan yang diberikan. Tidak hanya itu, pihak lain seperti dinas pertanian, kelompok tani, serta tokoh masyarakat juga dapat berkontribusi sebagai subjek penelitian karena keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan irigasi di tingkat desa.

Secara khusus dalam penelitian ini subjeknya antara lain

**Tabel 1.1**  
**Data Narasumber Penelitian**

No	Nama	Jabatan/Profesi	Jenis Kelamin
1	H. Sudibyo, S.Pd	Lurah	Laki-Laki
2	Krisna Cahyana S.H	Carik	Laki-Laki
3	Agus Tri Wibowo S.Kom	Ulu-Ulu	Laki-Laki
4	Suwarna	Ketua BPKal	Laki-Laki
5	Risti Dwi Prastiwi S.H	Dukuh	Perempuan
6	Endang	Pengurus Gapoktan	Perempuan
7	Daliman	Ketua Kelompok Tani	Laki-Laki
8	Surarti	Petani salak Pondoh	Perempuan
9	Rohit	Petani salak Pondoh	Laki-Laki
10	Sahit	Petani cabai dan sayuran	Laki-laki
11	Suroso	Petani Salak Pondoh	Laki-Laki
12	Wawan	Petani Salak Pondoh	Laki-Laki

*Sumber : Data Lapangan Penelitian 2025*

Penelitian ini melibatkan 12 informan dari berbagai latar belakang yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam upaya perlindungan terhadap petani di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten

Sleman. Dari unsur pemerintah kalurahan, H. Sudibyo, S.Pd bertindak sebagai Lurah, yakni kepala pemerintahan kalurahan yang memiliki wewenang tertinggi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan desa, termasuk kebijakan di sektor pertanian. Krisna Cahyana, S.H menjabat sebagai Carik, yaitu sekretaris desa yang bertugas mengelola administrasi dan mendukung teknis pelaksanaan program-program pemerintah desa, termasuk pendataan bantuan petani. Agus Tri Wibowo, S.Kom merupakan Ulu-Ulu, yaitu perangkat desa yang bertanggung jawab atas urusan pengairan dan pertanian, sehingga memiliki peran strategis dalam pengelolaan irigasi yang sangat krusial bagi petani. Sementara itu, Suwarna sebagai Ketua BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) berperan dalam fungsi legislatif di tingkat desa, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani dan mengawasi pelaksanaan program oleh pemerintah kalurahan. Dari unsur kelembagaan desa dan masyarakat lokal, terdapat Risti Dwi Prastiwi, S.H sebagai Dukuh, yaitu kepala padukuhan (dusun) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kalurahan di tingkat RT/RW serta mengetahui kondisi riil masyarakat petani di wilayahnya. Daliman merupakan ketua kelompok tani, Endang aktif sebagai pengurus Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Posisi ini penting karena kelompok tani dan gapoktan menjadi wadah resmi untuk pendistribusian bantuan, pelatihan, dan program pertanian dari pemerintah. Sementara itu, para informan dari kalangan petani meliputi Surarti, Rohit, Suroso, dan Wawan yang semuanya merupakan petani salak pondoh, serta Sahit yang merupakan petani cabai

dan sayuran, mewakili keragaman komoditas yang dibudidayakan di Girikerto. Total informan terdiri dari delapan laki-laki dan empat perempuan, menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kontribusi dalam sektor pertanian. Seluruh informan dipilih secara purposif berdasarkan peran, posisi, dan pengalaman mereka dalam praktik pertanian maupun dalam kebijakan perlindungan petani, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana pemerintah kalurahan memproteksi petani. Penggunaan istilah dan fungsi jabatan ini diatur oleh peraturan desa/kalurahan dan diperkuat oleh kebijakan pemerintah daerah DIY yang menghormati tradisi lokal.

Sementara itu, objek penelitian berfokus pada berbagai aspek perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada petani. Fokus perlindungan atau proteksi yang diteliti mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi kebijakan, distribusi sumber daya, dan komitmen pemerintah desa. Pertama, regulasi kebijakan berkaitan dengan aturan atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian, termasuk perlindungan lahan, penguatan kelompok tani, serta upaya menghadapi tantangan pertanian modern. Kedua, distribusi sumber daya atau bantuan mencakup penyaluran bantuan seperti pupuk, bibit, alat pertanian, serta akses terhadap program pemerintah yang ditujukan untuk petani. Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme distribusi dilakukan dan apakah berjalan secara adil dan tepat sasaran. Ketiga, komitmen Pemerintah Kalurahan merujuk pada kesungguhan dan

konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan petani, baik melalui pendampingan, pelatihan, maupun keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan, seperti program subsidi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dari perlindungan tersebut terhadap kesejahteraan petani serta produktivitas pertanian. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, baik dari segi sumber daya, koordinasi antar lembaga, maupun respons masyarakat, juga menjadi objek kajian penting. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintah kalurahan dalam menjaga keberlangsungan hidup petani di tengah tantangan yang ada.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Mereka berbagi pengalaman pribadi atau pandangan mereka mengenai isu yang diteliti. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai sumber lain, seperti arsip laporan dari instansi terkait atau referensi yang diperoleh dari perpustakaan. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan objek penelitian.

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara langsung mengamati berbagai elemen yang ada dalam objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara nyata bagaimana suatu fenomena terjadi, sehingga dapat memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Tujuan utama dari observasi adalah mendapatkan hasil yang akurat dan mendalam mengenai aspek yang sedang diteliti, sehingga membantu peneliti dalam menganalisis masalah secara lebih komprehensif (Widoyo, 2012).

Secara sederhana, observasi dapat dikatakan sebagai teknik penelitian yang mengandalkan pengamatan yang dilakukan langsung terhadap kejadian, perilaku, atau kondisi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat mencatat berbagai aspek yang terjadi di lapangan, baik yang tampak secara jelas maupun yang tersembunyi. Observasi juga membantu dalam mengukur atau menguji kecocokan antara data yang didapatkan dari wawancara atau dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh sebab itu, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan observasi, sehingga peneliti dapat melihat dan memahami situasi secara keseluruhan. Metode ini membantu peneliti dalam mengenali kondisi awal di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dari observasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai masalah yang sedang diteliti.

Adapun hal-hal yang diobservasi oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kehidupan para keluarga petani seperti rumah tangga mereka yang mana meliputi tempat tinggal. Tidak hanya itu, dalam observasi ini peneliti juga mengamati alat penunjang pertanian yang digunakan oleh petani dalam bertani, seperti mesin pemangkas, mesin pengangkut salak, mesin traktor dan beberapa alat lainnya. Selain itu, produksi pertanian salak mereka hingga sampai ke pasaran akan menjadi sebuah pengamatan khusus dalam penelitian ini. Proses produksi yang diamati meliputi tahapan mulai dari penanaman, perawatan tanaman, pemupukan, pemangkasan, hingga panen salak. Setelah dipanen, salak akan disortir berdasarkan kualitas, dikemas, dan kemudian didistribusikan ke pasar lokal maupun luar daerah. Peneliti juga mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan tengkulak atau pengepul sebagai bagian dari rantai distribusi. Seluruh proses ini diamati untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kalurahan dalam mendukung dan melindungi kegiatan produksi tersebut, baik melalui bantuan alat, pelatihan, maupun akses pasar.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan berbicara langsung kepada narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu masalah, topik, atau tema tertentu (Arikunto, 1993). Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat menggali lebih banyak informasi mengenai perasaan,

pemikiran, serta sudut pandang informan. Hal ini membantu dalam memperoleh data yang lebih mendalam dan tidak bisa didapatkan melalui metode lain.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian agar pemahaman terhadap masalah yang diteliti menjadi lebih luas. Informasi yang diperoleh dari wawancara juga dapat memperkuat hasil penelitian, karena memberikan gambaran langsung dari individu yang mengalami atau terlibat dalam situasi yang dikaji. Dengan demikian, wawancara menjadi salah satu teknik yang efektif dalam penelitian, terutama untuk menggali pengalaman dan pendapat seseorang secara rinci. Metode ini membantu peneliti mendapatkan data yang lebih kaya dan bermanfaat untuk menganalisis masalah dengan lebih jelas serta memahami konteks penelitian secara lebih baik.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang memiliki posisi strategis maupun pengalaman langsung dalam bidang pertanian di Kalurahan Girikerto. Narasumber yang diwawancara antara lain Lurah Girikerto, Carik (sekretaris desa), Ulu-uluh, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Dukuh, Ketua Kelompok Tani, pengurus Gapoktan, serta petani salak itu sendiri. Proses wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali jawaban lebih mendalam sesuai dinamika di lapangan. Setiap wawancara diawali dengan pengenalan dan penjelasan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Konten wawancara meliputi kebijakan desa terkait perlindungan petani, proses distribusi bantuan dan sumber daya, bentuk pendampingan dari pemerintah desa, peran kelompok tani, serta harapan petani terhadap dukungan pemerintah desa.

### c. Dokumentasi

Menurut Zuriah dalam Fiantika (2022) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai arsip, catatan aktivitas, dan peristiwa yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa tulisan, gambar, foto, video, atau dokumen lain yang mendukung penelitian. Teknik ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi tambahan yang dapat memperjelas atau memperkuat hasil penelitian (Fiantika et al., 2022).

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen yang dibuat langsung oleh subjek terkait. Dalam praktiknya, dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Metode ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu, dokumen yang diperoleh dapat menjadi sumber informasi historis yang berguna dalam menganalisis perubahan atau perkembangan suatu fenomena. Dokumentasi juga membantu dalam memverifikasi kembali data yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian (Herdiansyah, 2010)

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk dapatkan sebuah bukti yang tertulis secara visual dalam mendukung temuan penelitian. Dengan adanya dokumentasi, data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dalam penelitian ini antar lain seperti sebuah dokumen foto aktivitas kegiatan pertanian, dokumen luas area pertanian, dokumen Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, data produksi pertanian, data warga yang berprofesi sebagai petani dan data kepuasan petani terhadap pemerintah kalurahan. Dari data-data tersebut akan digunakan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Salsabila teknik analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi baru yang lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki pola yang jelas dan dapat digunakan sebagai solusi terhadap suatu permasalahan, terutama dalam penelitian. Ada berbagai metode dan teknik dalam analisis data, tergantung pada bidang atau tujuan penelitian yang dilakukan. Salah satunya adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik pengolahan data yang bersifat non-numerik dan lebih menekankan pada kualitas informasi yang diperoleh. Dalam metode ini, semakin rinci dan jelas data yang disajikan, maka semakin baik kualitas data tersebut dalam mendukung penelitian (Salsabila, 2022).

Miles dan Hubermen (dalam Zulfirman: 2022) menjelaskan juga bahwa Teknik analisis data memiliki 3 Prosedur dalam penyusunannya yang mana prosedur tersebut antara lain Reduksi Data, Penyajian Data, dan verifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. (Rony Zulfirman, 2022)

- a. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang penting. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data pada rentang waktu 17 April 2025 hingga 29 April 2025. Dari data yang diperoleh selama periode tersebut, peneliti melakukan seleksi dengan hanya menyertakan informasi yang relevan dengan konteks pembahasan. Data yang tidak berkaitan kemudian disisihkan. Adapun data yang dicantumkan merupakan konten yang sesuai dengan topik atau tema yang relevan, khususnya terkait dengan proteksi pertanian..
- b. Kedua, penyajian data, Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagianya dalam konteks sebagai satu kesatuan. Proses ini diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat, seperti perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, dan para petani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola penting terkait upaya proteksi yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap petani. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk narasi, sehingga pembaca dapat memahami informasi baik secara menyeluruh maupun dalam

bagian-bagian tertentu. Selain itu, setiap data yang ditampilkan juga dilengkapi dengan penjelasan atau interpretasi yang relevan, agar konteks dan maknanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini.

- c. Ketiga, verifikasi atau menarik kesimpulan, yaitu menganalisis data yang sudah disusun untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui tahapan analisis terhadap data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Proses ini diawali dengan verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar relevan dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai proteksi petani oleh Pemerintah Kalurahan. Selanjutnya, peneliti mengaitkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis dengan rumusan pertanyaan penelitian, serta mengidentifikasi pola dan tema yang muncul selama proses tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang dirumuskan berdasarkan data yang sahih dan telah diverifikasi. Dengan demikian, kesimpulan yang disusun mampu memberikan gambaran yang utuh serta memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan petani yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN GIRIKERTO DAN SUMBER DAYA PERTANIAN**

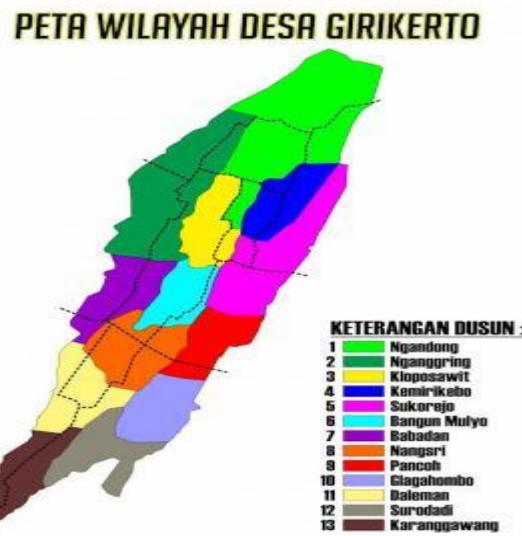
#### **A. Sejarah Kalurahan Girikerto**

Girikerto ialah sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Profinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaaan Girikerto itu sendiri tidak terlepas dari pembentukan reformasi yang dibuat atau yang dilakukan oleh DIY di awal kemerdekaan. Pasca itu kalurahan ini merupakan salah satu wilayah yang dibuat untuk menggabungkan empat Kalurahan yakni Kalurahan Tanggung, Kemiri Kebo, Nangsri Lor, dan Kalurahan Ngandong.

Di tahun 1046, berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai pembentukan pemerintahan di tingkat kalurahan, empat wilayah kalurahan yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian dilebur menjadi satu wilayah administratif yang bersifat otonom dengan nama Desa Girikerto. Penyatuan ini merupakan bagian dari upaya penataan wilayah dan pemerintahan desa yang lebih efisien serta terkoordinasi. Proses ini kemudian diperkuat secara hukum melalui penerbitan Dekrit Pemerintah DIY Nomor 5 Tahun 1948, yang secara resmi mengatur tentang penataan ulang wilayah-wilayah kalurahan di daerah Yogyakarta. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Desa Girikerto secara sah diakui sebagai satu kesatuan kalurahan baru. Dalam struktur wilayah administratif yang telah dibentuk tersebut, Kalurahan Girikerto terdiri dari tiga belas padukuhan yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran tersendiri dalam mendukung pemerintahan di tingkat

lokal. Penetapan ini menjadi dasar hukum dan administratif bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk lebih memahami struktur pembagian wilayah Kalurahan Girikerto, berikut disajikan ilustrasi atau gambar yang menunjukkan letak serta batas-batas dari masing-masing padukuhan yang termasuk dalam wilayah administratif kalurahan ini.

**Gambar 2.1**  
**Peta wilayah Kalurahan Girikerto**



Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024

## B. Kondisi Demografi

Kalurahan Girikerto berada di wilayah utara Kabupaten Sleman, tepatnya di lereng Gunung Merapi dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Posisi geografis ini menjadikan Girikerto sebagai kalurahan paling utara jika dilihat dari wilayah tengah Kabupaten Sleman. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, mengingat kondisi alam yang mendukung aktivitas pertanian dan

peternakan. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kependudukan di Kalurahan Girikerto, diperlukan analisis demografis yang menelaah kelompok masyarakat berdasarkan indikator tertentu seperti tingkat pendidikan, agama, kewarganegaraan, dan etnis. Ilmu demografi sendiri merupakan kajian ilmiah tentang dinamika penduduk yang mencakup aspek kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selain itu, demografi juga mempelajari jumlah penduduk, sebarannya secara geografis, struktur penduduk, serta perubahan-perubahan karakteristik tersebut dari waktu ke waktu.

Pemahaman dan penerapan metode analisis data kependudukan sangat penting dalam mengkaji isu-isu populasi. Oleh karena itu penelitian akan menyajikan data kependudukan Kalurahan Girikerto dengan sajian yang nantinya akan dikelempokan ke beberapa kriteria yaitu diantaranya anatara lain:

## **1. Jumlah Penduduk**

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Data kependudukan tidak hanya mencerminkan besarnya populasi, tetapi seharusnya juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam hal proteksi dan pemberdayaan petani.

Berikut merupakan tabel rincian lengkap jumlah penduduk berdasarkan populasi wilayah :

**Tabel 2.1**  
**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah**

No	Nama Pedukuhan	RT	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
<b>1</b>	Babandan	6	227	361	364	725
<b>2</b>	Bangun Mulyo	4	154	213	220	433
<b>3</b>	Dalamen	4	120	205	180	385
<b>4</b>	Glagahombo	4	90	153	157	310
<b>5</b>	Karanggawang	5	128	174	213	387
<b>6</b>	Kemirikebo	4	92	147	140	287
<b>7</b>	Kloposawit	4	155	244	244	488
<b>8</b>	Nangsri	5	136	215	231	446
<b>9</b>	Ngandong	11	277	435	421	856
<b>10</b>	Nganggring	6	276	409	431	840
<b>11</b>	Pancoh	4	166	239	243	482
<b>12</b>	Sukorejo	4	154	246	233	479
<b>13</b>	Surodadi	5	90	135	157	292
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>1.945</b>	<b>3.176</b>	<b>3.234</b>	<b>6.410</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto 2024*

Tabel tersebut menyajikan data sebaran penduduk Kalurahan Girikerto berdasarkan masing-masing padukuhan. Secara umum, Kalurahan Girikerto terdiri dari 13 padukuhan dengan total 66 Rukun Tetangga (RT) dan 1.945 Kepala Keluarga (KK). Jumlah total penduduk mencapai 6.410 jiwa, yang terdiri dari 3.176 laki-laki dan 3.234 perempuan.

Data ini menunjukkan bahwa penduduk tersebar cukup merata di seluruh wilayah padukuhan, meskipun ada beberapa padukuhan yang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi seperti Ngandong (856 jiwa), Nganggring (840 jiwa), dan Babandan (725 jiwa). Sebaliknya, padukuhan seperti Glagahombo dan Surodadi memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan padukuhan lainnya.

Secara keseluruhan, komposisi antara jumlah laki-laki dan perempuan tergolong seimbang, dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak. Informasi ini seharusnya menjadi dasar penting bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, program pembangunan, serta upaya perlindungan sosial, termasuk di bidang pertanian yang menjadi sektor utama di wilayah ini.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan data sebaran usia penduduk Kalurahan Girikerto Tahun 2024, jumlah total penduduk berusia 5 tahun ke atas mencapai 6.411 jiwa. Komposisi usia ini terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Kelompok usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun, mendominasi jumlah penduduk dengan jumlah yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa Kalurahan Girikerto memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi tumpuan utama masyarakat desa. Berikut merupakan rincian lengkap mengenai data penduduk berdasarkan kelompok umur :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Usia Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	5 – 9 tahun	172
2	10 – 14 tahun	392
3	15 – 19 tahun	452
4	20 – 24 tahun	463
5	25 – 29 tahun	450
6	30 – 34 tahun	412
7	35 – 39 tahun	347
8	40 – 44 tahun	408
9	45 – 49 tahun	451
10	50 – 54 tahun	467
11	55 – 59 tahun	514
12	60 – 64 tahun	381
13	65 – 69 tahun	290
14	70 - 74 tahun	218
15	75 tahun ke atas	1.037
Total		6.494

*Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Dengan ini dapat dilihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kalurahan Girikerto memiliki total penduduk sebanyak 6.494 jiwa, dengan sekitar 4.345 orang berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa Kalurahan Girikerto memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dan potensial untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian salak.

Dilihat dari situ pemerintah seharusnya mampu memanfaatkan potensi tenaga kerja usia produktif tersebut sebagai modal utama untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas petani salak. Dengan adanya tenaga kerja yang cukup, pemerintah sebenarnya bisa mengembangkan berbagai program

pelatihan dan pendampingan agar petani mampu mengadopsi teknik pertanian modern dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah kalurahan seharusnya juga dapat memfasilitasi akses permodalan dan sarana produksi secara merata dan adil agar petani lebih mudah meningkatkan hasil panen dan kualitas salak.

c. Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut merupakan rincian dari data jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencahariannya :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/Perkebunan	2.172
2	Pelajar/Mahasiswa	1.250
3	Belum/Tidak Bekerja	988
4	Karyawan Swasta	735
5	Mengurus Rumah Tangga	423
6	Wiraswasta	314
7	Buruh Harian Lepas	109
8	Pensiunan	81
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65
10	Guru/Dosen	65
11	Buruh Tani/Perkebunan/Peternakan	35
12	Perangkat Desa	28
13	Kepala Desa	1
14	Pedagang	53
15	Kepolisian RI (Polri)	19
16	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	14
17	Sopir	15
18	Tukang Kayu	11
19	Perawat	7

<b>20</b>	Pembantu Rumah Tangga	6
<b>21</b>	Peternak	4
<b>22</b>	Wartawan	1
<b>23</b>	Lain-lain	20
Total Keseluruhan		6.311

*Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar warga Kalurahan Girikerto menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan jumlah mencapai 2.172 orang dari total populasi. Di antara para petani ini, terdapat keragaman tanaman yang diusahakan, mulai dari sayur-sayuran, padi, cabai, hingga berbagai jenis buah. Namun, yang paling mendominasi dan telah menjadi identitas wilayah Girikerto sejak lama adalah pertanian atau perkebunan salak. Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi di Kalurahan Girikerto, diketahui bahwa komoditas utama yang paling banyak dihasilkan adalah salak pondoh.

Salak pondoh di wilayah ini telah menjadi produk unggulan (brand lokal) dan bahkan sudah terdaftar hak patennya. Komoditas ini juga telah menembus pasar ekspor ke luar negeri, tidak hanya dijual di pasar domestik.

**Gambar 2.2**  
**Foto Buah Salak Pondoh Dan Lahan pertanian Salak Pondo**



*Sumber : Dokumentasi Foto Di Lapangan Penelitian*

Namun, di sisi lain, saat ini salak pondoh mengalami penurunan daya jual. Hasil observasi dan wawancara dengan para petani menunjukkan bahwa banyak dari mereka mulai mengganti lahan kebun salaknya dengan tanaman sayuran. Hal ini dilakukan karena mereka mengeluhkan harga salak yang terus menurun saat musim panen, sehingga tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai. Akibat kondisi tersebut, petani memilih untuk beralih menanam komoditas lain yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

Di sisi lain, masyarakat Girikerto juga memiliki mata pencaharian lain yang cukup beragam. Sebanyak 1.250 jiwa merupakan pelajar atau mahasiswa, yang menandakan tingginya partisipasi pendidikan di kalangan penduduk usia sekolah dan remaja. Sementara itu, terdapat 988 jiwa yang belum atau tidak bekerja, yang kemungkinan besar termasuk ibu rumah tangga, anak-anak, lansia, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Penduduk yang bekerja di sektor formal juga cukup signifikan, seperti karyawan swasta sebanyak 735 jiwa, pegawai negeri sipil (PNS) dan guru/dosen masing-masing 65 jiwa, serta perangkat desa sebanyak 28 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah terserap dalam sektor birokrasi dan layanan publik.

Ada juga yang menggeluti sektor informal dan jasa seperti wiraswasta (314 jiwa), pedagang (53 jiwa), buruh harian lepas (109 jiwa), sopir (15 jiwa), dan tukang kayu (11 jiwa). Meskipun jumlahnya lebih kecil, keberadaan mereka turut mendukung perputaran ekonomi lokal. Selain itu, terdapat profesi lain seperti perawat, peternak, pembantu rumah tangga, bahkan wartawan,

yang menggambarkan keragaman profesi di kalangan warga Kalurahan Girikerto.

## **2. Keadaan Sosial Penduduk Kalurahan Girikerto**

Keadaan sosial masyarakat Kalurahan Girikerto, Kabupaten Sleman, menunjukkan kehidupan yang harmonis dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Warga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya nilai luhur seperti toleransi antarumat beragama, kebersamaan, serta semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial yang rukun ini menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan yang aman dan nyaman.

Masyarakat Kalurahan Girikerto juga aktif dalam menjaga dan mewariskan tradisi budaya serta kesenian lokal yang telah ada sejak lama. Adat istiadat tetap dilestarikan melalui berbagai kegiatan budaya dan upacara tradisional, yang tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur tetapi juga sebagai sarana mempererat ikatan sosial antarwarga. Selain itu, kegiatan budaya gotong royong juga menjadi ruang berkumpulnya warga, termasuk para petani, untuk saling bertukar informasi dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan sektor pertanian.

## **3. Keadaan Ekonomi**

Sektor pertanian memegang peranan sentral dalam menopang perekonomian Kalurahan Girikerto, menjadi sumber penghidupan utama yang paling banyak bagi sebagian besar penduduk. Kegiatan bercocok tanam dan berkebun tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menghasilkan surplus yang berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan

wilayah yang lebih luas. Meskipun terdapat sebagian kecil warga yang berprofesi di luar sektor agraris, seperti ASN, TNI/POLRI, tenaga pendidik, dan buruh, lanskap ekonomi Girikerto didominasi oleh aktivitas pertanian.

Secara spesifik, pertanian di Girikerto memiliki kekhasan pada perkebunan salak, yang telah lama menjadi identitas dan komoditas unggulan wilayah ini. Selain salak, petani juga mengusahakan beragam tanaman lain seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, menunjukkan adanya diversifikasi dalam praktik bertani meskipun salak tetap menjadi primadona. Potensi lahan yang subur dan pengetahuan turun-temurun dalam bertani menjadi modal penting bagi produktivitas sektor ini.

Selain itu pada sektor peternakan, Girikerto dikenal sebagai salah satu sentra ternak kambing Peranakan Etawa (PE). Produk utama dari ternak ini adalah susu kambing, yang selain dijual dalam bentuk segar juga diproses lebih lanjut oleh industri lokal. Tercatat ada lebih dari 13 unit pengolahan susu kambing PE yang aktif di wilayah ini. Keberadaan industri ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil ternak, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru, terutama karena tingginya harga jual susu kambing di pasaran.

Selain kambing, masyarakat juga memelihara hewan ternak lain seperti sapi, unggas, dan ikan air tawar. Namun, penyebarannya tidak merata karena faktor geografis dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kelayakan budidaya di masing-masing padukuhan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, sebagian warga mengembangkan kegiatan wirausaha melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk yang dihasilkan bervariasi, seperti makanan olahan, kerajinan tangan, warung kelontong, serta usaha keterampilan lainnya.

Dari sisi perdagangan, potensi ekonomi juga terlihat cukup signifikan. Terdapat warung kelontong di hampir setiap padukuhan, walaupun optimalisasi fasilitas ekonomi umum seperti Pasar Kalurahan “Nggowo”, pasar ikan Daleman, dan pasar kambing Nganggring masih belum maksimal. Keberadaan ruko, toko bangunan, apotek, hingga pasar modern menandakan aktivitas ekonomi yang mulai berkembang, meski jumlahnya masih terbatas.

Selain perdagangan, bidang jasa juga turut berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Usaha seperti salon, bengkel, perabotan rumah tangga atau furnitur, dan penjahit tersebar di beberapa titik di wilayah kalurahan. Walaupun begitu bidang pertanian di Girikerto masih menjadi pedoman bagi banyak masyarakat untuk mencari hidupnya di bidang pertanian.

### C. Kelembagaan

Kehadiran lembaga atau organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik di tingkat kalurahan. Dengan kewenangan serta legitimasi yang dimilikinya, lembaga pemerintahan menjadi penggerak utama dalam upaya pemenuhan hak-hak serta kebutuhan warga masyarakat. Di Kalurahan Girikerto sendiri, terdapat dua institusi pemerintahan utama yang menjadi wadah penyulur

aspirasi dan ide-ide masyarakat, yakni lembaga pemerintahan kalurahan dan lembaga kemasyarakatan desa.

## **1. Lembaga Pemerintah Kalurahan**

Pemerintah Kalurahan merupakan lembaga yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang menjalankan fungsi pemerintahan bersama jajaran pamong atau perangkat desa sebagai unsur pelaksana administratif. Lurah, yang dalam konteks Kalurahan Girikerto dipilih secara langsung oleh warga melalui proses seleksi hingga pemilihan, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.

Sebagai pejabat politik di tingkat kalurahan, Lurah tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh perangkat desa seperti Carik, Tata Laksana, Pangripta, Danarta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwo, serta para Dukuh yang bertugas sebagai Kepala Kewilayahan. Peran dan tanggung jawab Lurah telah diatur secara resmi dalam Peraturan Kalurahan Girikerto Nomor 04 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Girikerto. Di dalamnya dijelaskan bahwa Lurah memiliki tugas sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan warga. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Lurah juga dibantu oleh tim pelaksana yang terdiri dari tujuh orang pamong inti, tiga belas Dukuh, enam staf tetap, serta dua pegawai tidak tetap. Berikut merupakan struktur pemerintahan Kalurahan Girikerto :

**Gambar 2.3**  
**Struktur Pemerintahan Kalurahan Girikerto**



Sumber : profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024

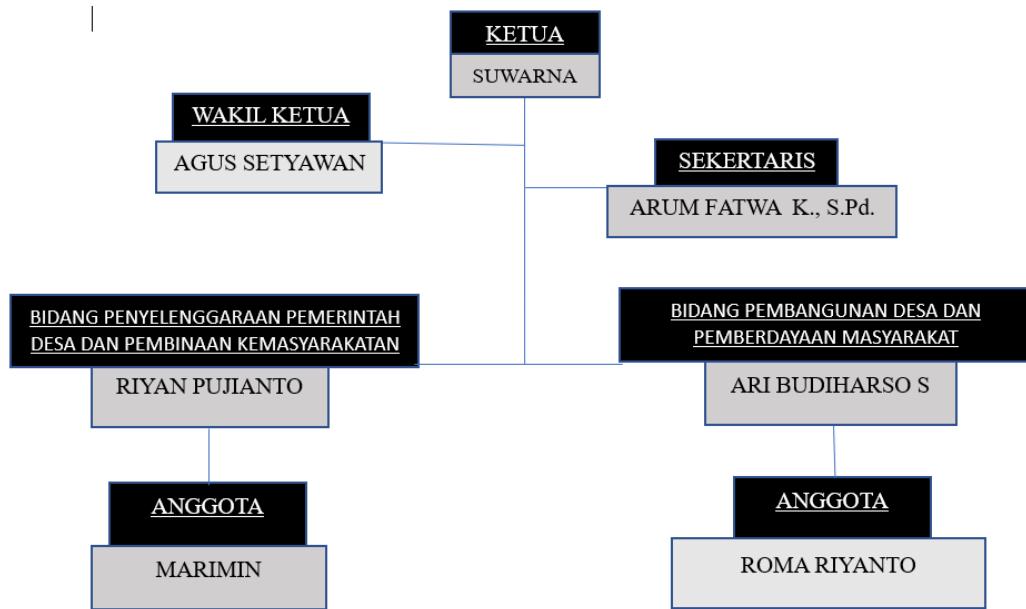
## 2. Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPKal)

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BP-Kal) merupakan salah satu lembaga penting yang berperan sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Keberadaan BP-Kal sangat vital karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingannya kepada pemerintah kalurahan. Dalam menjalankan tugasnya, BP-Kal memiliki peran strategis, antara lain sebagai penyalur suara warga, pemberi saran dan masukan kepada Lurah dalam proses pengambilan keputusan, serta sebagai lembaga yang ikut menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Selain itu, BP-Kal juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa agar proses

administrasi maupun pelaksanaan program tetap mengacu pada prinsip transparansi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini sangat penting guna memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah kalurahan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat dan tidak keluar dari koridor hukum. Oleh karena itu, BP-Kal berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah kalurahan, sekaligus sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel di tingkat desa atau kalurahan.

Keanggotaan BP-Kal terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah keterwakilan yang telah ditentukan. Dengan begitu, keberadaan BP-Kal mencerminkan suara dan kehendak masyarakat dari berbagai padukuhan di Kalurahan. Dasar hukum yang mengatur tugas serta hak dan kewajiban BP-Kal tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari Perbup Nomor 22.1 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai besaran tunjangan, biaya operasional, serta cakupan peran BP-Kal dalam sistem pemerintahan kalurahan. Berikut gambar struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto.

**Gambar 2.4**  
**Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto**



*Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Struktur kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BP-Kal)

Girikerto masa jabatan 2021–2026 menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan representatif. Dalam struktur tersebut, Suwarna menjabat sebagai Ketua, dengan Agus Setyawan sebagai Wakil Ketua, dan Arum Fatwa K., S.Pd. sebagai Sekretaris. Kepemimpinan ini memainkan peran penting dalam pengawasan kebijakan desa, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. BP-Kal juga memiliki pembagian tugas yang lebih spesifik melalui dua bidang utama. Riyantoro Pujianto bertanggung jawab pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, sementara Ari Budiharso S. menangani Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kehadiran dua anggota

lainnya, yaitu Marimin dan Roma Riyanto, turut memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan dalam menjembatani aspirasi masyarakat.

Dalam konteks perlindungan terhadap petani salak di Kalurahan Girikerto, struktur ini menjadi penting karena BP-Kal berfungsi sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki kewenangan untuk memberi masukan terhadap peraturan kalurahan serta mengawasi pelaksanaannya. Dengan pembagian bidang tersebut, BP-Kal seharusnya dapat menjalankan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan desa, termasuk distribusi bantuan pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, dan pemberdayaan kelompok tani, benar-benar berpihak kepada petani. Selain itu, keterlibatan anggota BP-Kal dalam proses musyawarah dan pengawasan menjadi salah satu bentuk konkret proteksi kelembagaan terhadap keberlangsungan hidup petani. Oleh karena itu, struktur dan kinerja BP-Kal tidak hanya mencerminkan tata kelola yang demokratis, tetapi juga seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi petani sebagai aktor utama dalam pembangunan desa.

### **3. Lembaga Kalurahan**

#### a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani di Kalurahan Girikerto, peran kelembagaan menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang turut berperan dalam mendukung upaya ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK). LPMK merupakan organisasi kemasyarakatan di tingkat kalurahan yang bertugas membantu pemerintah

kalurahan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Lembaga ini juga mendorong masyarakat untuk aktif ikut serta dalam membangun kalurahan, terutama lewat semangat gotong royong dan juga pengawasan pembangunan, termasuk pembangunan di sektor pertanian.

Di Kalurahan Girikerto, LPMK memiliki susunan kepengurusan yang lengkap, mencakup ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang seperti pembangunan fisik, keagamaan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kepemudaan. Kehadiran berbagai bidang ini memungkinkan LPMK untuk berperan secara holistik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani.

Berikut struktur Lembaga LPMK yang ada di Kalurahan Girikerto seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kaliurahan Girikerto**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua I	Ir. Siswantara
2	Ketua II	Wagiman
3	Sekertaris I	Kalis Triyanto S.Pus
4	Sekertaris II	Try Dady Widiyanto
5	Bendahara I	Waliyo S.Pd
6	Bendahara II	Sardi S.Pd MM
7	Bidang Pembangunan Fisik	Ir. Priyatmoko Harjanta
8	Bidang Keagamaan	Arkham Lukman
9	Bidang Pendidikan, Pelatihan	Agung Tri Suryanto
10	Bidang Ekonomi	Sunarto Suranto
11	Bidang Budaya	Suhariyanto Murwato
12	Bidang Pemuda dan Olahraga	Ari Widiantoro

*Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023*

Kehadiran berbagai bidang ini memungkinkan LPMK untuk berperan secara holistik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani salak.

Bidang ekonomi dan pembangunan fisik dalam struktur LPMK memiliki potensi besar untuk bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam mendukung kebutuhan petani, seperti pengadaan sarana pertanian, perbaikan infrastruktur jalan tani, serta pengembangan akses pasar. Selain itu, melalui pendekatan partisipatif dan gotong royong, LPMK mendorong masyarakat, termasuk kelompok tani, untuk terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang berpihak pada sektor pertanian.

Namun sayangnya, LPMK di Kalurahan Girikerto masih berjalan belum semaksimal mungkin. Hal ini terlihat dari belum menyeluruhnya jangkauan lembaga tersebut terhadap seluruh petani salak di wilayah ini. Tidak semua petani mendapatkan manfaat langsung dari program atau inisiatif yang digagas oleh LPMK. Beberapa petani bahkan tidak tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), sehingga mereka tidak merasakan hasil nyata dari kerja lembaga ini. Akibatnya, ada kesenjangan dalam akses terhadap bantuan, informasi, maupun kegiatan pemberdayaan yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi LPMK.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur dan semangat kelembagaan telah terbentuk, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat peran LPMK agar lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh elemen petani di kalurahan.

b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Selain LPMK, salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki kontribusi signifikan dalam kehidupan sosial di Kalurahan Girikerto adalah PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Organisasi ini berfokus pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan di tingkat kalurahan, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Di Girikerto, keberadaan PKK sangat menonjol dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Berikut daftar keanggotaan PKK yang ada di Girikerto seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

Jabatan	Nama Anggota	Keterangan
Pelindung	H Sudibya S.Pd	Lurah Girikerto
Pembina	Teguh Raharjo S.Pt	Kamitua
Ketua	Hj. Winarti A.Md.Keb	Menyusun Rencana kerja
Wakil ketua	Isnaini Okvianing Azizah A.Md.Keb	
Ketua umum pokja	Lilis Kusuma Dewi	Pembinaan karakter keluarga, pendidikan , peningkatan ekonomi keluarga, dan kesehatan keluarga.
bendahara	Mardiatyi	
Ketua pokja 1	Eni Lestari dan 7 anggota lainnya	Penghayatan, pengalaman pancasila dan gotong royong
Ketua pokja 2	Anuk Miarsa dan 8 anggota lainnya	Pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi
Ketua Pokja 3	Rumiyanti dan 8 anggota lainnya	Pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga
Ketua pokja 4	Nurhayati dan 8 anggota lainnya	Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan kesehatan.

*Sumber : Profil kalurahan Girikerto Tahun 2023*

PKK dikenal sebagai wadah bagi kaum perempuan, khususnya para ibu, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berbasis keluarga. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan antara lain pengajian rutin, penyuluhan tentang keluarga berencana, pelatihan keterampilan untuk usaha mikro kecil (UMKM), serta seminar terkait kesehatan anak, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seluruh kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, yang secara tidak langsung juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa, termasuk para keluarga petani.

Namun demikian, PKK di Kalurahan Girikerto juga menghadapi tantangan dalam mencapai dampak yang lebih menyeluruh, terutama karena keanggotaan PKK masih didominasi oleh kaum ibu. Padahal, isu-isu seperti kesejahteraan keluarga, ketahanan pangan, hingga edukasi pertanian rumah tangga idealnya melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk para bapak yang sebagian besar berperan sebagai petani. Keterlibatan laki-laki dalam program PKK masih tergolong rendah, sehingga beberapa potensi sinergi antara program PKK dan kebutuhan petani belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hal ini menjadi penting mengingat 10 Program Pokok PKK mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengamalan Pancasila, gotong royong, ketahanan pangan, sandang, perumahan, pengelolaan rumah tangga, pendidikan, keterampilan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan keluarga. Program-program tersebut sejatinya dapat menjadi

pintu masuk untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan keluarga petani dalam upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara lebih luas.

### c. Organisasi Karang Taruna

Karang Taruna juga menjadi salah satu lembaga strategis yang berperan dalam pembangunan sosial di Kalurahan Girikerto. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di tingkat desa atau kalurahan. Bersifat sosial dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial, Karang Taruna bertujuan untuk membina serta mengembangkan potensi generasi muda agar menjadi pribadi yang mandiri, peduli, dan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Di Kalurahan Girikerto, Karang Taruna memiliki struktur kelembagaan yang cukup solid dan terbagi ke dalam berbagai bidang kegiatan. Beberapa di antaranya adalah bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mendorong anak muda terlibat dalam pengembangan usaha kecil, bidang Rekreasi, Olahraga, dan Kesenian (ODK) yang mewadahi kreativitas pemuda, serta Unit Kesehatan Sosial (UKS) yang peduli terhadap isu kesehatan masyarakat. Tak kalah penting adalah divisi Humas Kemitraan dan Media (KDM), bidang Pendidikan dan Pelatihan (PDP), serta Lingkungan Hidup dan Pariwisata (LHP) yang mendukung pelestarian alam dan potensi lokal, termasuk agrowisata berbasis pertanian salak. Terakhir, bidang Kerohanian dan Bina Mental (KBM) bertugas memperkuat karakter dan spiritualitas para anggota.

Berikut merupakan struktur kepengurusan dari Karang Taruna yang ada di Kalurahan Girikerto:

**Tabel 2.6**  
**Struktur Organisasi Karang Taruna**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua umum	Muiz Yurohmad
Sekertaris	Risky Indriyana
Bendahara	Anisa Dhifa Nirmalasari
Kepala seksi UEP	Ridha Hermawan
Kepala rekreasi, ODK	Sidik Nur Hadi
Kepala Umas UKS	Dwi Sutrisno
Kepala humas KDM	Hendri Nur Arbiyanto
Sie PDP	Ristri Dwi Prastiwi
Kepala LHP	Rachmad bayu Aji
Kepala KBM	Fajar Yuliani

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023*

Karang Taruna sejatinya memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pemberdayaan pemuda tani dan mendukung regenerasi petani di Girikerto. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi, Karang Taruna dapat menjadi jembatan untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian, baik melalui pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian, maupun kegiatan agrowisata yang melibatkan produk salak sebagai ikon lokal.

Namun demikian, peran Karang Taruna dalam isu pertanian masih belum tergarap secara maksimal. Kegiatan mereka cenderung lebih dominan di bidang seni, olahraga, dan sosial kemasyarakatan umum. Minimnya integrasi antara Karang Taruna dengan kelompok tani atau pelaku pertanian mengakibatkan potensi kolaborasi belum sepenuhnya dimanfaatkan, khususnya dalam hal regenerasi petani yang menjadi tantangan nyata di Kalurahan Girikerto.

d. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

Badan Usaha Milik Kalurahan, atau yang sering disebut BUMKal, merupakan salah satu lembaga yang dibentuk atas kesepakatan antara pemerintah kalurahan dan warga masyarakat. Lembaga ini memiliki legalitas tersendiri dan bekerja secara mandiri dalam mengelola serta mengembangkan potensi lokal yang dimiliki Kalurahan. Tujuan utama dari pembentukan BUMKal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan lokal.

Di Kalurahan Girikerto sendiri mempunyai BUMKal yang bernama BUMKal Gerbang Merapi. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Gerbang Merapi, yang didirikan melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal, ini memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi Kalurahan Girikerto. Berikut struktur kepengurusan BUMKal yang ada di Kalurahan Girikerto :

**Tabel 2.7**  
**Struktur Pengurus BUMKal Girikerto**

No	Nama	Jabatan
1	Sudibya S.Pd	Penasehat
2	Ir. Siswantara	Pengawas
3	M. Saepudin	Direktur
4	Rudi Pramoko, S.Pd	Sekertaris
5	Yuni Triyadi	Bendahara
6	Ngatijan	Manager Usaha Wisata
7	Martono Teguh	Pegawai Usaha Listrik
8	Yuni Triyadi	Pegawai Usaha SPTA
9	Honorias Wida	Manager Usaha Catering
10	Deni	Pegawai Usaha Susu

*Sumber: Profil kalurahan Girikerto Tahun 2024*

BUMKal ini memiliki unit usaha ekowisata, keterkaitannya dengan sektor pertanian di Girikerto sangat erat. Kalurahan Girikerto, yang terletak di lereng Merapi, memiliki potensi alam yang melimpah, tidak hanya untuk pariwisata tetapi juga sebagai sentra pertanian salak (Salak Pondoh) serta peternakan kambing perah Etawa.

Apalagi Kalurahan Girikerto itu sendiri membuat sebuah wisata pertanian, yaitu Agrowisata Buah Ngandong, yang merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mensejahterakan petani yang ada. Agrowisata ini nantinya akan dikelola oleh BUMKal, dan hasil dari keberadaan wisata agro buah di Ngandong akan dibagikan dengan skema pembagian keuntungan sebesar 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk pemerintah Kalurahan melalui BUMKal.

Unit usaha ekowisata yang dikelola BUMKal, seperti Ekowisata Pancoh, menjadi jembatan penting untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan pertanian. Konsep agrowisata memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan alam sekaligus berinteraksi langsung dengan kegiatan pertanian lokal, seperti wisata petik salak atau kunjungan ke peternakan kambing Etawa. Integrasi ini tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk pertanian lokal, meningkatkan pemasaran, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat petani dan keberlanjutan BUMKal.

Namun, sampai sekarang, jangkauan manfaat yang ditujukan oleh BUMKal tersebut belum merata. Hanya petani-petani yang tergabung dalam

sebuah kelompok seperti Gapoktan saja yang dapat dijangkaunya, meninggalkan potensi besar pada petani mandiri yang belum tergabung dalam kelompok.

#### **D. Visi Misi Kalurahan Girikerto**

Di kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta mempunyai visi yang mana visi tersebut antara lain yaitu Sejahtera, Mandiri, Religius, Berbudaya dalam Lingkungan yang Lestari.

1. Kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara fisik maupun batiniah, secara adil dan merata. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari sejumlah indikator seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, tersedianya peluang kerja yang luas, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.
2. Kemandirian Kalurahan Girikerto ditandai dengan kemampuannya mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik dari aspek sumber daya alam, manusia, maupun sosial budaya. Pemerintah kalurahan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara tepat, serta mampu mengenali dan memanfaatkan peluang yang mendukung penguatan sektor ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing masyarakat, dan bertambahnya pendapatan asli kalurahan guna mencukupi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Nilai religius berlandaskan pada kesadaran spiritual yang tulus terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama dan spiritualitas, yang didukung oleh peran aktif masyarakat serta pemerintah. Toleransi dan sikap saling menghormati menjadi dasar dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Pemerintah juga mendukung penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan ajaran masing-masing agama guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.
4. Berbudaya dalam Lingkungan yang Lestari artinya Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap norma-norma luhur serta tetap menjaga dan melestarikan tradisi, seni, dan budaya warisan leluhur. Pelestarian budaya dilakukan baik terhadap benda budaya maupun warisan tak benda, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dijaga dan dikembangkan sebagai identitas lokal yang memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Visi pembangunan Kalurahan Girikerto selaras dengan arah kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga daerah. Di tingkat nasional, visi ini berpijak pada RPJMN 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut juga mengacu pada arah

pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.”Sementara itu, di tingkat kabupaten, visi Kalurahan sejalan dengan RPJMD Sleman 2021–2026, yakni: “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong.”

Selain itu adapun Misi dari Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta ini yaitu antara lain:

1. Dalam bidang pemerintahan, Kalurahan Girikerto berupaya memperkuat pengelolaan administrasi dengan menata dokumen secara tertib dan menyusun sistem kerja yang terorganisir, sehingga menciptakan tata kelola yang efisien dan profesional. Pelayanan publik juga terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk dokumen atau proses administratif, tetapi juga melalui sikap aparatur yang mencerminkan nilai budaya lokal, khususnya etika dan sopan santun Jawa. Aparat diharapkan menjadi sosok pamong yang tidak sekadar melayani, tetapi juga membimbing dan melindungi masyarakat. Selain itu, peningkatan kinerja pamong menjadi prioritas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas di atas kepentingan pribadi. Guna menciptakan kehidupan sosial yang aman dan nyaman, kalurahan mendorong pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat solidaritas sosial.
2. Dalam aspek pembangunan, Kalurahan Girikerto menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi di sektor pertanian,

peternakan, perikanan, pariwisata, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Strategi pembangunan dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan nyata dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Kalurahan juga mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap potensi wilayahnya masing-masing dan memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan. Di sisi lain, upaya menjaga kelestarian alam tetap menjadi perhatian utama, dengan menolak segala bentuk eksplorasi yang tidak ramah lingkungan demi keberlanjutan sumber daya alam.

3. Di bidang kemasyarakatan, pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam misi kalurahan. Kegiatan seni dan adat istiadat terus didukung agar tidak hilang oleh waktu. Kalurahan juga menjunjung tinggi nilai toleransi antarumat beragama, dengan menciptakan ruang dialog dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Untuk memperkuat kualitas spiritual warga, dilakukan pembinaan keagamaan melalui pelatihan dan kegiatan keagamaan secara terarah. Pendidikan juga menjadi fokus penting, dengan pemberian bantuan dan pembinaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sementara itu, peningkatan kualitas kesehatan ditempuh melalui program jaminan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Generasi muda pun tidak dilupakan, dengan pembinaan yang terintegrasi melalui wadah Karang Taruna, mendorong pemuda agar mampu menjadi pribadi kreatif dan inovatif namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

## **E. Potensi Kalurahan Girikerto**

Ada banyak potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Girikerto yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sektor peternakan, seperti peternakan kambing, serta potensi lainnya yang tersebar di berbagai bidang. Namun, salah satu potensi yang paling menonjol dan memiliki daya saing tinggi adalah pertanian salak pondoh. Berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sebagian besar penduduk Kalurahan Girikerto menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Di antara berbagai hasil pertanian yang dibudidayakan, salak pondoh menjadi komoditas unggulan yang telah lama dikenal baik dari segi kualitas maupun nilai jualnya.

Keunggulan ini tidak lepas dari faktor pendukung seperti kondisi tanah yang subur, iklim yang cocok, serta pengalaman bertani yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Salak pondoh tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama, tetapi juga membuka peluang untuk dikembangkan lebih jauh melalui inovasi pengolahan hasil pertanian dan penguatan jaringan pemasaran. Bahkan, potensi ini juga dapat diarahkan ke sektor agrowisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi kreatif.

Namun sayangnya, pertanian salak yang ada di Girikerto saat ini mulai mengalami penurunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian yang sebelumnya ditanami salak pondoh kini telah ditebang dan diganti dengan tanaman lain. Para petani menghadapi berbagai permasalahan,

salah satunya adalah harga jual salak yang menurun drastis saat musim panen.

Kondisi ini membuat sebagian petani memilih untuk berhenti menanam salak.

## **G. Sumber Daya Pertanian**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, wilayah Kalurahan Girikerto secara visual didominasi oleh area pertanian yang luas. Luas area pertanian di Girikerto terbagi menjadi persawahan seluas 354,6298 Ha dan ladang/tegalan seluas 385,0975 Ha. Secara keseluruhan, total luas area pertanian di wilayah ini mencapai sekitar 739,7273 Ha. Ciri khas ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat setempat.

Di Girikerto, jenis petani yang mendominasi sangat beragam dan saling melengkapi. Mayoritas petani adalah petani salak, khususnya salak Pondoh dan salak Gading, mengingat wilayah ini merupakan sentra produksi salak terkemuka. Selain itu, dengan adanya area persawahan dan tegalan, terdapat juga petani padi yang mengolah sawah, serta petani ladang/tegalan yang menanam berbagai jenis palawija seperti jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Banyak petani di Girikerto juga merupakan peternak, terutama kambing Peranakan Etawa (PE), yang mana mereka seringkali mengintegrasikan budidaya tanaman dengan peternakan, bahkan sampai pada pengolahan susu kambing. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Girikerto memiliki karakteristik yang holistik, di mana petani tidak hanya berfokus pada satu komoditas saja, tetapi juga menggabungkan berbagai jenis usaha pertanian dan peternakan.

Berdasarkan data yang diperoleh ada sekitar 1.172 masyarakat yang bekerja di sektor pertanian/perkebunan. Dari 2.172 warga Girikerto yang bekerja di pertanian atau perkebunan, sekitar 1.318 orang menanam salak yang memang menjadi komoditas unggulan daerah ini. Selain salak, warga juga menggarap berbagai jenis pertanian lain. Sekitar 217 orang menanam padi, sementara sekitar 108 orang menanam cabai dan sayur-sayuran. Tidak hanya itu, ada juga sekitar 95 orang yang bergelut di bidang buah-buahan. Melengkapi keragaman sektor pertanian, sekitar 434 orang terlibat dalam usaha peternakan. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa salak adalah primadona pertanian di Girikerto, namun warga juga secara signifikan berkontribusi pada produksi padi, cabai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan memiliki usaha ternak yang berperan penting dalam perekonomian lokal.

Pertanian salak merupakan komoditas yang paling terkenal di Girikerto. Warga banyak menanam Salak Pondoh, ini merupakan varietas unggulan daerah ini. Salak tersebut tidak hanya dijual di pasar lokal tetapi juga memiliki nilai jual tinggi karena bisa dieksport ke luar negeri dan diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti manisan, keripik, atau sirup salak.

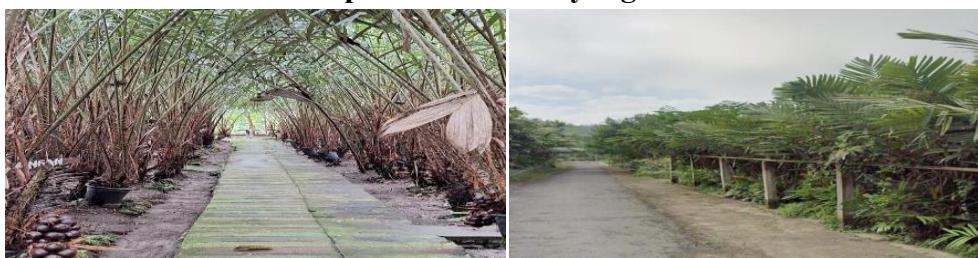
**Gambar 2.5**  
**Produk Olahan Salak**



*Sumber : Dokumentasi Di Lapangan Penelitian 2025*

Selain menjadi sentra penghasil salak, lahan pertanian di Kalurahan Girikerto juga dimanfaatkan secara optimal untuk menanam padi, palawija, sayuran, dan bambu. Penanaman padi dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pokok pangan masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan pangan lokal. Tanaman palawija seperti jagung, ketela, dan umbi-umbian lainnya menjadi sumber pangan alternatif sekaligus penghasilan tambahan bagi petani. Beragam sayur-mayur juga dibudidayakan untuk konsumsi harian dan dijual di pasar tradisional sekitar. Selain itu, bambu turut dimanfaatkan karena memiliki nilai ekonomis dan ekologis; selain digunakan sebagai bahan bangunan dan kerajinan, tanaman ini juga membantu menjaga struktur tanah dan mencegah erosi.

**Gambar 2.6**  
**Foto Lahan pertanian Salak yang ada di Girikerto**

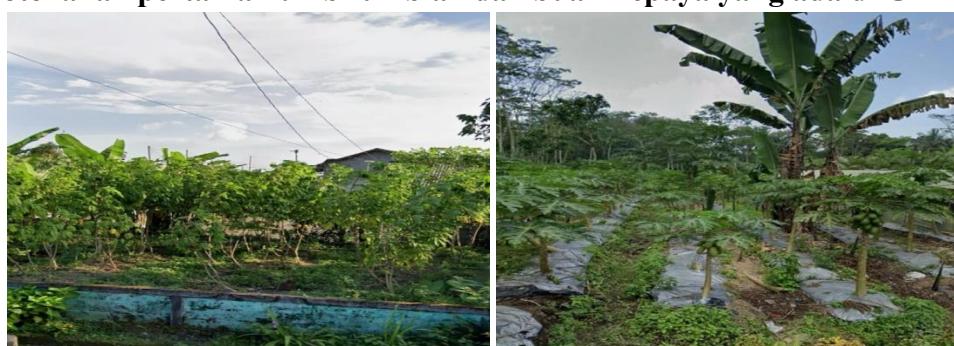


*Sumber : Dokumentasi Foto Di Lapangan Penelitian 2025*

Gambar 2.6 menunjukkan kondisi lahan pertanian salak yang terdapat di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Lahan ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat setempat, di mana mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, khususnya komoditas salak pondoh. Dari foto terlihat bahwa tanaman salak ditanam secara teratur dalam barisan yang rapi dengan jarak tanam tertentu, yang menunjukkan adanya sistem budidaya yang tertata meskipun dilakukan secara tradisional. Kondisi geografis Girikerto yang berada di lereng Gunung Merapi menjadikan wilayah ini memiliki tanah yang subur dan cocok untuk tanaman hortikultura, termasuk salak. Lahan-lahan seperti ini tersebar di beberapa padukuhan, dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh petani maupun melalui kelompok tani. Dokumentasi ini diambil langsung saat proses observasi lapangan dalam rangka penelitian pada tahun 2025 dan menjadi bukti visual atas eksistensi aktivitas pertanian salak sebagai sektor dominan dalam struktur ekonomi lokal masyarakat Girikerto. Selain Salak adapun pertanian yang ada di Girikerto itu sendiri antara lain seperti umbi-umbian dan juga buah-buahan.

**Gambar 2.7**

**Foto lahan pertanian umbi-umbian dan buah Pepaya yang ada di Girikerto**



*Sumber : Dokumentasi Foto Di Lapangan Penelitian 2025*

Gambar 2.7 memperlihatkan salah satu bentuk diversifikasi lahan pertanian di Kalurahan Girikerto, yaitu lahan yang ditanami komoditas umbi-umbian dan buah pepaya. Selain salak pondoh sebagai komoditas utama, sebagian petani di wilayah ini juga memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam tanaman lain seperti ketela, singkong, serta pepaya sebagai bentuk alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Diversifikasi ini dilakukan sebagai strategi adaptasi terhadap fluktuasi harga pasar dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas saja. Tanaman umbi-umbian biasanya ditanam di lahan kering atau pekarangan yang masih tersedia, sementara pepaya dibudidayakan di sela-sela tanaman lainnya untuk efisiensi lahan. Kondisi lahan pada gambar menunjukkan bahwa sistem pertanian di Girikerto bersifat campuran dan menyesuaikan dengan kondisi geografis serta kebutuhan petani. Foto ini diambil langsung selama proses observasi lapangan penelitian tahun 2025 dan menjadi bukti keberagaman aktivitas pertanian masyarakat Girikerto. Selain itu adapun bentuk pertanian lain seperti Cabai dan juga Sayur-sayuran.

**Gambar 2.8**  
**Foto Lahan pertanian Cabai dan Sayur-sayuran yang ada di Girikerto**



*Sumber : Dokumentasi Foto Di Lapangan Penelitian 2025*

Gambar 2.8 menampilkan lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya cabai dan berbagai jenis sayur-sayuran di wilayah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Selain dikenal sebagai sentra salak pondoh, wilayah ini juga memiliki lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk menanam hortikultura lain seperti cabai, sawi, bayam, kacang panjang, dan jenis sayuran lainnya. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam secara musiman oleh petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun pasar tradisional di sekitar wilayah Sleman dan Yogyakarta. Sistem pertanian yang digunakan sebagian besar masih tradisional, namun menunjukkan pola tanam yang teratur dan penataan lahan yang cukup baik. Keberadaan lahan cabai dan sayuran ini menunjukkan bahwa masyarakat petani di Girikerto tidak hanya bergantung pada satu komoditas utama, melainkan juga melakukan diversifikasi pertanian sebagai strategi ekonomi. Dokumentasi ini diambil pada saat kegiatan observasi lapangan tahun 2025 dan memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kegiatan pertanian masyarakat Girikerto secara menyeluruh.

**Gambar 2.9**  
**Foto Lahan pertanian sawah yang ada di Girikerto**



*Sumber : Dokumentasi Foto Di Lapangan Penelitian 2025*

Gambar 2.9 memperlihatkan lahan pertanian sawah yang masih terdapat di wilayah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Meskipun Girikerto lebih dikenal sebagai sentra produksi salak pondoh, namun sebagian kecil wilayahnya masih mempertahankan sistem pertanian basah berupa sawah. Lahan sawah ini biasanya terletak di daerah yang memiliki akses pengairan cukup. Aktivitas pertanian sawah menjadi bagian penting dari ketahanan pangan lokal, meskipun luasannya tidak sebesar lahan salak atau hortikultura lainnya. Komoditas yang umum ditanam di sawah ini antara lain padi, dengan pola tanam musiman yang menyesuaikan kondisi air dan cuaca. Keberadaan sawah ini menunjukkan adanya keragaman sistem pertanian di Girikerto dan mencerminkan upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi bertani padi sekaligus menjaga ketersediaan pangan. Foto ini diambil dalam proses observasi lapangan pada tahun 2025 sebagai bagian dari dokumentasi visual kegiatan pertanian di wilayah penelitian.

### **BAB III**

### **PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMPROTEKSI PETANI**

Adapun poin penting yang menjadi kajian dalam penelitian ini yang sebagaimana fokus pada skripsi yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Dalam Memproteksi Petani” yaitu :

#### **A. Ketersediaan Regulasi atau Kebijakan Tentang Perlindungan Petani Dari Pemerintah Kalurahan**

Regulasi merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan desa karena berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam konteks perlindungan atau proteksi terhadap kelompok rentan seperti petani, regulasi memiliki peran strategis untuk menciptakan kepastian hukum, mengatur tata kelola sumber daya, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial petani. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa regulasi yang dibuat berpihak pada kepentingan petani, terutama dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, kerusakan infrastruktur irigasi, dan alih fungsi lahan. Melalui regulasi yang disusun secara partisipatif dan responsif, pemerintah desa dapat merancang program perlindungan yang konkret, seperti pengelolaan distribusi pupuk, akses terhadap bantuan pertanian, dan pembentukan kelembagaan tani yang kuat. Dengan demikian, keberadaan regulasi tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan politik

pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta menjamin kesejahteraan petani sebagai pilar ketahanan pangan desa.

Berkaitan dengan itu di Kalurahan Girikerto itu sendiri menunjukkan belum adanya produk hukum lokal atau regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini diakui oleh Ulu-Ulu Kalurahan Girikerto Agus Tri Wibowo, yang menyampaikan bahwa

“Berkaitan dengan produk hukum kita ke petani jujur sebelumnya masih sama seperti di pemerintahan nasional karena kita untuk peraturan desa belum yang spesifik ke pertanian, yang penting tidak menanam pohon-pohon yang dilarang seperti contohnya tanaman ganja dan sebagainya.”  
(hasil wawancara 17 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peraturan di tingkat Kalurahan Girikerto masih bersifat umum dan tidak difokuskan pada sektor pertanian secara khusus. Fokus kebijakan yang ada lebih banyak pada hal-hal yang bersifat larangan, tanpa adanya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap keberlanjutan sektor pertanian.

Lebih lanjut, Carik Kalurahan Girikerto Krisna Cahyana S.H menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pertanian di tingkat Kalurahan, pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator, mengenai masalah regulasi itu masih berpatokan pada peraturan dari kementerian ataupun peraturan daerah, seperti hasil wawancara berikut :

“Kalau berbicara mengenai pertanian, kita memiliki yang namanya Gapoktan, KWT, UMKM dan kelompok lainnya di mana kelompok ini menjadi ujung tombak kami untuk mewadahi para petani yang mana dari kelompok-kelompok tersebut para petani dapat memperoleh pendampingan, akses informasi, pelatihan, hingga bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta untuk pertanian yang ada. Selain itu, keberadaan kelompok ini juga memudahkan koordinasi dan distribusi sumber daya, termasuk pupuk, benih, serta program-program

pemberdayaan ekonomi. Kalau berbicara soal regulasi, kami masih mengacu pada aturan dari kementerian hingga ke peraturan daerah. Sementara itu, di tingkat Kalurahan sendiri, regulasi yang secara khusus memfokuskan pada perkebunan atau pertanian memang belum sampai ke tahap itu. Yang jelas kita pihak kalurahan mengimplementasikan regulasi-regulasi di pemerintahan pusat maupun daerah. Yang mana kami di Pemerintah Kalurahan berperan sebagai fasilitator bagi para kelompok petani, dalam wujudnya itu seperti satu berkaitan dengan forum komunikasinya, dua kaitannya dengan berbicara dengan olahan-olahan dari prodak lokal, ketika jualannya mulai rendah di situ kami berupayah untuk ada inovasi baru dalam menangani hal tersebut, jadi kami berkolaborasi juga dengan para akademisi terus dengan pemerintahan yang membidangi entah itu dinas pertanian, dinas pendistribusian dan perdagangan entah itu UMKM-nya juga. Jadi secara pentahelix kita itu berjalan, karena ketika kita berbicara prodak omong kosong jika kita tidak bisa memarketingkan atau menjualnya.” (hasil wawancara 28 april 2025)

Lebih lanjut carik juga menyampaikan;

“Kalau kita bicara acuan regulasi pertanian, memang piramidanya jelas. Dari pusat, kita punya Peraturan Menteri Pertanian. Yang paling utama terkait pembinaan kelompok tani itu adalah Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Ini landasan bagaimana Gapoktan itu dibentuk, dibina, dan dikembangkan. Lalu, ada juga Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yang lebih luas lagi cakupannya. Untuk di daerah, khususnya Sleman, kita punya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum. Yang paling relevan dan strategis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan. Ini penting sekali karena mengatur agar lahan pertanian kita tidak gampang beralih fungsi, menjaga keberlangsungan sektor pangan di Sleman. Selain itu, di tingkat Provinsi DIY, kita juga punya acuan yang kuat yaitu Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perda Provinsi ini adalah payung besar yang melandasi semua upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di seluruh kabupaten/kota di DIY, termasuk Sleman. Semuanya saling berkaitan dan melengkapi. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi kami untuk terus mendampingi dan memberdayakan para petani melalui kelompok-kelompok mereka. Tanpa adanya kerangka regulasi ini, program dan pembinaan akan sulit berjalan optimal.”(hasil wawancara 18 Mei 2025)

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Suwarna selaku ketua BPKal Girikerto menyangkut Regulasi ini yang mana dia menjelaskan bahwa ;

“Berkaitan dengan pertanian, tentunya di setiap perumusan peraturan Kalurahan, baik itu RPJ, RKP, atau juga APBKAL, di sana selalu ada bidang pertanian. Untuk pertanian di Girikerto itu sendiri, ada berbagai banyak tanaman yang ditanam, tetapi yang paling dominan di sini ialah budidaya salak pondoh. Dan di sini, untuk menunjang kehidupan bagi para petani juga, menurut saya kurang cukup. Oleh karena itu, di setiap kegiatan Kalurahan kan kita ada wadah-wadah di setiap lembaga Kalurahan salah satunya adalah UMKM, Gapoktan, KWT. Nah, disitulah wadah-wadah untuk petani. Dari situ nanti program-program apa yang mereka usulkan ke Kalurahan, nanti kita bisa memantau atau melihat, dan nanti kita akan mengusulkan ke Kalurahan bersama dengan Lurah dalam musyawarah Kalurahan. Jadi, di bidang regulasi, apalagi akhir-akhir ini di bidang ketahanan pangan, itu kan 20% dari Dana Desa itu harus masuk ke situ. Dan oleh karena itu, kita tidak akan terlepas dari keputusan itu. Jadi, 20% dari anggaran desa itu sekitar 250-an juta itu larinya ke ketahanan pangan.” (hasil wawancara 25 april 2025)

Pemerintah Kalurahan Girikerto belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam menjalankan fungsi ini, Kalurahan sepenuhnya mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pertanian seperti Permentan Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 67 Tahun 2016 mengenai pembinaan kelompok tani, serta Peraturan Daerah (Perda) seperti Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Meskipun demikian, pihak Kalurahan berperan aktif sebagai fasilitator bagi kelompok petani seperti Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan UMKM. Wujud fasilitasi ini meliputi penyediaan forum komunikasi, pengembangan inovasi produk lokal, terutama saat harga pasar rendah, serta kolaborasi dengan

akademisi dan dinas terkait (pertanian, distribusi dan perdagangan, UMKM) untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran.

Namun, fokus fasilitasi ini cenderung terbatas pada petani yang tergabung dalam kelompok, sehingga petani individu yang tidak menjadi anggota kelompok tersebut berpotensi kurang tersentuh oleh program dan dukungan yang diberikan Kalurahan. Dan juga wujud dari pemerintah kalurahan seperti apa yang dikatakan oleh Carik tersebut itu tidak semua petani merasakannya. Hal ini terkonfirmasi dari wawancara dengan Sahit selaku petani yang tidak tergabung dalam kelompok.

Berikut penjelasan dari Sahit selaku petani salak yang tidak tergabung dalam kelompok pertanian;

“Petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan umumnya memiliki akses pemasaran yang lebih baik, bahkan hasil panennya bisa disalurkan hingga ke jalur ekspor. Sebaliknya, petani yang tidak masuk dalam kelompok tersebut biasanya hanya menjual hasil pertanian kepada tengkulak dengan harga yang cenderung lebih rendah yaitu sekitar Rp.1.500/kilo disaat panen raya. Selain itu, bagi para petani yang tidak tergabung dalam kelompok juga kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah. Berkaitan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah kalurahan itu entah saya yang tidak mengetahuinya tapi menurut saya tidak ada fasilitas yang diberikan kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok seperti saya”. (hasil wawancara 26 April 2025).

Selain itu penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Rusti Dwi Prastiwi selaku Dukuh, yang menjelaskan bahwa ;

“Di dalam Kalurahan Girikerto itu sendiri Itu ada namanya kelompok tani, jadi melalui wadah ini kita komunikasikan apa sih kendala dari pertanian yang ada dan apa sih yang dibutuhkan. Nah, dari situ, karena dari pemerintah saat ini ketika ingin pengajuan apapun itu, kita harus melalui wadah kelompok.” (25 april 2025)

Begitupun penjelasan yang sama yang disampaikan oleh Endang selaku pengurus dari Gapoktan yang mana dia menjelaskan;

“kelompok tani saat ini menjadi jalur utama penyaluran program pemerintah, termasuk bantuan dan pelatihan. Petani yang tergabung dapat memasarkan hasil panen hingga ke jalur ekspor, sementara mereka yang tidak bergabung umumnya menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah.” ( hasil wawancara 19 april 2025)

Selain itu adapun pendapat yang disampaikan oleh Daliman selaku ketua Kelompok Tani yang mana dia juga menjelaskan seperti berikut;

“Untuk sementara ini, kami sudah tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah. Saat ini, kebutuhan seperti pupuk dan lain-lain kami usahakan secara mandiri. Terkadang, di dalam kelompok kami juga mengadakan pelatihan secara swadaya, termasuk mencari sendiri narasumber untuk pelatihan tersebut. Sampai sekarang, saya merasa UMKM yang ada di Girikerto belum dapat diandalkan karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan komoditas yang ada. Hal ini turut menyebabkan harga salak terus mengalami penurunan.” (hasil wawancara pada 26 April 2025)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Pemerintah Kalurahan Girikerto belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pertanian tetapi pemerintah kalurahan Girikerto masih berpatokan pada regulasi yang sudah ada dari peraturan kementerian pertanian sampai ke peraturan daerah yang mengatur tentang pertanian tersebut. Meskipun demikian, pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi sektor pertanian melalui pembentukan kelembagaan seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), dan kelompok-kelompok tani lainnya. Melalui kelembagaan tersebut, petani dapat terwadahi, sehingga pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan (kontrol) serta menjalankan fungsi sebagai fasilitator, antara lain

dalam bentuk distribusi bantuan, penyampaian informasi, dan komunikasi dibidang pertanian.

Namun, meskipun kelembagaan tersebut telah dibentuk, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan petani. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua petani tergabung atau terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tani seperti Gapoktan atau KWT. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam akses terhadap bantuan dan program pemberdayaan yang disalurkan melalui kelembagaan tersebut.

Ketiadaan regulasi lokal yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan tata kelola pertanian yang adil dan inklusif. Selama ini, arah kebijakan dan penyaluran bantuan lebih banyak terfokus pada petani yang tergabung dalam kelompok formal, sementara petani yang tidak tergabung kerap terpinggirkan dari akses bantuan, pelatihan, dan jalur pemasaran yang menguntungkan.

Hal ini menunjukkan pentingnya peran regulasi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus wujud keberpihakan pemerintah desa terhadap kelompok rentan, dalam hal ini petani. Tanpa adanya regulasi yang berpihak dan responsif, potensi ketimpangan akses petani mandiri akan terus berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat Kalurahan untuk seluruh petani, baik yang tergabung dalam kelompok maupun tidak, dapat memperoleh hak yang sama atas

bantuan, perlindungan usaha tani, serta kesejahteraan ekonomi. Regulasi desa yang spesifik dan kontekstual menjadi langkah krusial untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai pelindung dan pemberdaya petani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

## **B. Distribusi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Terhadap Petani**

Distribusi sumber daya itu bisa dikatakan sebagai proses penyaluran atau pembagian berbagai bentuk sumber daya baik yang bersifat alamiah, manusia, maupun buatan kepada individu, kelompok, atau wilayah tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, atau mendukung kegiatan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, distribusi sumber daya dilakukan oleh negara atau lembaga pemerintahan kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Sumber daya yang didistribusikan dapat berupa sumber daya fisik seperti alat, bahan, dan infrastruktur, serta sumber daya nonfisik seperti informasi, pengetahuan, pelatihan, dan dukungan kelembagaan. Dalam sektor pertanian, misalnya, distribusi sumber daya mencakup penyaluran alat mesin pertanian, bibit unggul, pupuk, bantuan keuangan, hingga pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan para pelaku usaha tani.

Distribusi sumber daya juga berfungsi sebagai salah satu cara negara atau pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan mendistribusikan sumber daya secara merata dan tepat sasaran, diharapkan tidak terjadi

ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Karena itu, mekanisme distribusi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, efisiensi, kebutuhan lokal, serta transparansi agar tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan sosial. Dalam pelaksanaannya, distribusi sumber daya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga desa, dan kelompok masyarakat penerima. Proses ini biasanya didasarkan pada kebijakan yang telah dirancang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses distribusi sering kali dilakukan melalui lembaga perantara seperti kelompok tani, koperasi, atau organisasi masyarakat sipil untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan program.

Distribusi sumber daya juga mencerminkan sejauh mana peran negara, khususnya pemerintah desa atau kalurahan, dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Efektivitas distribusi ini sangat bergantung pada sistem kelembagaan, transparansi, prinsip keadilan, serta kemauan politik dari pihak pemerintah lokal. Begitupun halnya dengan Kalurahan Girikerto, yang memiliki tanggung jawab dalam mendistribusikan sumber daya demi mendukung kesejahteraan para petani. Dalam konteks pembangunan pedesaan, distribusi sumber daya oleh pemerintah desa menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah kalurahan memiliki peran strategis dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, termasuk bagaimana sumber daya yang dimiliki baik berupa dana, alat, sarana produksi, maupun pelatihan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui program-

program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan masyarakat tani, dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan. Distribusi ini juga mencakup bantuan langsung seperti benih, pupuk, atau alat pertanian, serta dukungan tidak langsung berupa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Kalurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat juga harus mampu membaca kebutuhan lokal secara akurat agar distribusi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pihak di Kalurahan Girikerto, tampak bahwa distribusi sumber daya oleh pemerintah kalurahan cukup aktif, namun masih menyisakan berbagai tantangan, terutama dalam aspek pemerataan. Pemerintah Kalurahan Girikerto telah mengalokasikan 20% dari Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Ini merupakan bentuk konkret dari komitmen distribusi sumber daya yang diarahkan untuk mendukung pertanian khususnya budidaya salak pondoh yang menjadi tanaman utama di daerah ini. Dana ini dimanfaatkan untuk peremajaan tanaman, pemberian bibit buah seperti alpukat dan durian, serta pengadaan alat pertanian secara stimulan seperti yang dikatakan oleh H. Sudibya, S.Pd selaku Lurah Girikerto yang mengatakan bahwa ;

“Cukup banyak bantuan yang diberikan melalui Dana Desa, di mana 20% dari total dana tersebut dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dari sisi ini, beberapa petani khususnya yang mendominasi sebagai petani salak mendapatkan bantuan melalui kelompok tani kami, baik dalam hal

perawatan maupun peremajaan tanaman. ” (hasil wawancara 28 april 2025)

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa;

“Sebagai contoh, pemerintah kalurahan memberikan bibit tanaman buah seperti alpukat dan durian sebanyak 1500 bibit bagi tempat yang bisa dikatakan gersang, dan sudah berjalan 1 setengah tahun untuk kembali ke masyarakat. Ketika hal itu mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dibagikan kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri mendapatkan bagian yang besar. Yang bisa dikatakan, Girikerto membuat argobuah dan hasil itu dibagi 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk pemerintah melalui BUMKal.” (hasil wawancara 28 april 2025)

Penjelasan ini mengungkapkan bahwa pemerintah Kalurahan Girikerto sangat mendukung sektor pertanian, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mengalokasikan 20% dari Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan, yang sebagian besar diperuntukkan bagi petani. Penjelasan ini menunjukkan upaya pemerintah Kalurahan Girikerto dalam menggunakan Dana Desa untuk memperkuat ketahanan pangan, serta bagaimana mereka berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengelola hasil pertanian.

**Gambar 3.1**  
**Foto tempat Wisata Agro Buah Girikerto**



*Sumber : Foto dokumentasi di lapangan penelitian 2025*

Berkaitan dengan bantuan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pihak kalurahan ini, Krisna Cahyana S.H selaku Carik juga menjelaskan bahwa ;

“Tidak hanya menjadi fasilitator yang memfasilitasi, kita juga memberikan alat-alat apa saja sesuai dengan kebutuhan yang bersifat stimulan. Salah satu alat spesifik adalah cultivator. Alat ini sangat penting untuk petani karena berfungsi untuk mengolah tanah. Dengan cultivator, tanah yang keras bisa menjadi lebih gembur dan subur, yang tentunya akan meningkatkan hasil panen. Selain itu salah satu bentuk dukungan kami ialah membuat wadah kaitan dengan kelompok seperti sekertariatan ataupun memfasilitasi ketika pertemuan. Jadi kita berkomitemen agar kelompok-kelompok seperti Gapoktan, KWT ataupun kelompok lainnya menjadi mandiri dimana kita selalu suport dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Yang harus digaris bawahi bahwa kami hanya memberikan bantuan yang bersifat stimulan.” (hasil wawancara 28 April 2025)

Penjelasan dari Carik ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kalurahan Girikerto tidak hanya terbatas sebagai fasilitator yang menjembatani antara petani dan pihak luar, tetapi juga aktif memberikan dukungan nyata yang bersifat stimulan untuk mendukung aktivitas pertanian. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk alat-alat pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan, bukan berdasarkan keinginan semata. Salah satu contoh bantuan yang diberikan adalah alat pertanian berupa *cultivator*, yang berfungsi untuk mengolah tanah agar menjadi lebih gembur dan subur. Alat ini sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas pengolahan lahan dan berdampak pada peningkatan hasil panen. Selain dukungan alat, Pemerintah Kalurahan juga memberikan fasilitasi kelembagaan bagi petani, seperti menyediakan sekretariat untuk kelompok tani atau mendukung kegiatan pertemuan kelompok. Upaya ini dilakukan untuk mendorong kemandirian kelompok-kelompok tani seperti Gapoktan dan KWT. Pemerintah

berkomitmen untuk terus mendampingi kelompok-kelompok ini dengan menyediakan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan agar mereka dapat berfungsi secara optimal dan mandiri. Pendapat mengenai bentuk bantuan atau distribusi sumber daya yang dilakukan oleh pihak pemerintah kalurahan juga disampaikan oleh salah satu tokoh penting di kalangan petani, yakni pengurus Gapoktan, Endang. Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan, Endang dengan jelas memberikan pandangannya terkait bagaimana proses penyaluran bantuan itu berjalan di tingkat kalurahan.

“Dulu dari pemerintah kalurahan pernah ada bantuan berupa pemberian bibit salak madu. Namun, di kalurahan, bantuan seperti itu harus disalurkan melalui kelompok tani. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dari dinas-dinas terkait, di mana untuk mendapatkan bantuan atau dukungan, harus melalui kelompok, bukan diberikan langsung kepada petani secara individu.” (hasil wawancara 19 April 2025)

Kalimat tersebut menjelaskan tentang mekanisme penyaluran bantuan dari pemerintah kalurahan kepada petani, khususnya bantuan berupa bibit salak madu. Penjelasannya menunjukkan bahwa bantuan tidak diberikan secara langsung kepada masing-masing petani, melainkan harus melalui kelompok tani yang telah terbentuk secara resmi di tingkat desa. Artinya, kelompok tani menjadi perantara atau wadah resmi dalam proses distribusi bantuan tersebut.

Ini dilakukan bukan hanya di tingkat kalurahan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan dari dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian. Dengan ini, petani yang ingin mendapatkan bantuan harus tergabung dalam kelompok tani, karena pemerintah menganggap kelompok tersebut sebagai unit yang legal dan efektif dalam menyalurkan serta mengelola bantuan.

Merujuk pada kenyataan bahwa petani diarahkan atau didorong untuk tergabung dalam suatu wadah atau kelompok tani, maka dapat dikatakan bahwa proses pemerataan terhadap sumber daya yang seharusnya diterima oleh para petani belum berjalan secara adil dan merata. Dalam praktiknya, mekanisme distribusi sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa maupun instansi terkait ternyata lebih memprioritaskan petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya seperti bantuan pupuk, bibit, ataupun pelatihan.

Hal ini juga dijelaskan secara langsung oleh para petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Mereka merasakan langsung dampak dari sistem distribusi yang tidak merata tersebut. Suroso salah satu petani yang tidak tergabung dalam kelompok secara tegas menyampaikan:

“Nggak ada bantuan dari pemerintah. Kalau yang tidak termasuk dalam kelompok itu sulit untuk mendapatkan bantuan, misalkan pupuk.” (hasil wawancara 26 april 2025)

Masih banyak juga para petani yang tidak tergabung dalam kelompok menjelaskan hal yang sama tentang itu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan dalam kelompok tani menjadi faktor penentu dalam akses terhadap bantuan. Bagi petani yang berada di luar kelompok, peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah menjadi sangat kecil, bahkan cenderung tidak ada. Akibatnya, mereka merasa terpinggirkan dari kebijakan perlindungan atau pemberdayaan petani yang semestinya bersifat inklusif artinya tidak melibatkan semua pihak.

Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pertanian di tingkat kalurahan tampaknya berkaitan erat dengan adanya dorongan atau kecenderungan dari pemerintah untuk mengarahkan para petani agar bergabung terlebih dahulu dalam suatu kelompok tani atau wadah kelembagaan formal seperti Gapoktan. Dalam praktiknya, sistem distribusi yang berlaku hanya menjangkau mereka yang sudah terorganisir dalam kelompok, sementara petani yang berada di luar struktur kelembagaan tersebut sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap berbagai bentuk bantuan, seperti pupuk subsidi, bibit, pelatihan, maupun bantuan alat pertanian. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keberadaan petani non-anggota kelompok tidak sepenuhnya diakui dalam sistem distribusi yang ada. Keanggotaan kelompok menjadi semacam syarat tak tertulis untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah kalurahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberdaya masyarakat tani secara menyeluruh.

### **C. Komitmen Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani**

Komitmen pemerintah kalurahan terhadap petani merupakan bentuk tanggung jawab dan perhatian pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan hidup para petani di wilayahnya. Petani sebagai aktor utama dalam sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, peran pemerintah kalurahan sangat

penting dalam memastikan bahwa para petani mendapatkan perlindungan, dukungan, serta akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan.

Komitmen ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penyusunan dan penerapan regulasi desa yang berpihak kepada petani, distribusi bantuan pertanian yang merata dan adil, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga pelibatan aktif petani dalam proses perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kalurahan juga bertanggung jawab dalam menjembatani kepentingan petani dengan pihak luar, termasuk pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan pasar, ini mencakup upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah kabupaten, dinas pertanian, serta instansi terkait lainnya guna memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan petani dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara tepat. Pemerintah kalurahan juga berperan penting dalam menghubungkan petani dengan pasar, baik lokal maupun regional, agar hasil pertanian dapat terserap dengan harga yang layak.

Dalam hal ini pemerintah kalurahan girikerto sudah ada komitmen untuk keberlangsungan petani atau kesejahteraan petani yang mana dalam hasil wawancara Lurah Kalurahan Girikerto menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian merupakan target utama. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah distribusi 1.500 bibit buah alpukat dan durian ke wilayah yang dianggap gersang. Program ini sudah berjalan selama satu setengah tahun dan diarahkan agar hasil pertaniannya kembali ke masyarakat. Model distribusinya menempatkan masyarakat sebagai penerima utama hasil

pertanian 80%, sementara 20% dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam skema argobuah. Berikut hasil wawancara bersama H. Sudibya, S.Pd selaku Lurah;

“Dari Pemerintah Kalurahan, berdasarkan visi misi Kalurahan yang berbicara mengenai kelestarian lingkungan, maka upaya memberdayakan masyarakat dalam aspek pertanian menjadi target utama Kalurahan. Sebagai contoh, Pemerintah Kalurahan memberikan bibit tanaman buah seperti alpukat dan durian sebanyak 1.500 bibit untuk wilayah yang bisa dikatakan gersang. Program ini sudah berjalan selama satu setengah tahun, dengan tujuan agar hasilnya nanti bisa kembali kepada masyarakat. Ketika program tersebut mulai menghasilkan, maka hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat, di mana masyarakat sendiri akan mendapatkan bagian yang besar. Pemerintah Kalurahan Girikerto membentuk program argobuah, di mana hasilnya dibagi 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen untuk pemerintah melalui BUMKal.” (hasil wawancara 28 april 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Carik Kalurahan, Krisna Cahyana S.H.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Girikerto tidak ingin menjadikan masyarakat tergantung, tetapi mendorong kemandirian melalui pembinaan kelembagaan petani:

“Pemerintah Girikerto berusaha membuat masyarakat itu lebih mandiri, bukan bermental meminta. Yang mana pemerintah berusaha membuat supaya kelompok-kelompok seperti Gapoktan, KWT, menjadi mandiri. Di mana pemerintah selalu suport dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.” (hasil wawancara 28 april 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah diarahkan untuk jangka panjang, membentuk kelembagaan yang kuat dan tidak hanya memenuhi permintaan sesaat dari warga secara khusus para petani. Pemerintah Kalurahan Girikerto tidak hanya memberikan perhatian pada kesejahteraan petani secara langsung, tetapi juga berupaya untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari luar.

Salah satu bentuk dari kemandirian yang terjadi dalam kelompok tani yaitu adanya wisata petik salak organik yang dikelola oleh Gapoktan itu sendiri, yang mana wisata ini dibuat untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperluas sumber pendapatan petani, serta memperkenalkan potensi lokal salak organik kepada wisatawan dan masyarakat luas. Secara Khusus Endang juga menjelaskan bahwa ;

“Wisata petik salak organik ini kami buat bukan semata-mata untuk melakukan branding terhadap salak pondoh, tetapi juga untuk memperkenalkan kepada para pengunjung bahwa salak pondoh secara historis berasal dari wilayah ini. Dalam arti lain, kami menciptakan wisata ini sebagai upaya pelestarian, agar salak pondoh yang ada di Girikerto tidak hilang atau punah, baik secara fisik maupun secara identitas sebagai warisan lokal masyarakat” (hasil wawancara 19 April 2025)

**Gambar 3.2**  
**Foto Wisata Petik Salak Organik Di Kalurahan Girikerto**



*Sumber : Foto dokumentasi di lapangan penelitian 2025*

Berdasarkan komitmen ini Ulu-ulu Kalurahan Agus Tri Wibowo pun menambahkan bahwa komitmen ini dijalankan dengan prinsip tepat sasaran:

“Kami memprioritaskan warga yang benar-benar bertani. Kalau memang butuh bibit dan ada niat menanam, pasti kami bantu. Tapi tidak semua

langsung dapat, karena tergantung kuota.” (hasil wawancara 17 april 2025)

Pernyataan yang disampaikan tersebut dibenarkan oleh Endang selaku Pengurus Gapoktan yang mana di menjelaskan bahwa ;

“Dulu dari pemerintah kalurahan pernah ada bantuan berupa pemberian bibit salak madu. Namun, di kalurahan, bantuan seperti itu harus disalurkan melalui kelompok tani.” (hasil wawancara 19 April 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan tidak hanya fokus pada bantuan material, tetapi juga pada pembangunan karakter petani dan tata kelola yang berkelanjutan. Komitmen ini mencerminkan orientasi jangka panjang yang strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian lokal. Dengan adanya pernyataan bahwa Pemerintah Kalurahan Girikerto mendorong kemandirian petani, maka dapat dilihat bahwa para petani juga mengupayakan berbagai bentuk usaha untuk menjaga keberadaan salak sekaligus melakukan *branding* terhadap komoditas tersebut, salah satunya melalui pengembangan wisata petik salak organik.

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan pihak terkait, Komitmen Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam memproteksi dan memberdayakan petani tidak hanya diwujudkan melalui program internal seperti distribusi bibit dan pembentukan kelembagaan tani, tetapi juga tercermin dalam upaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Kalurahan tidak bekerja secara eksklusif yang artinya tidak hanya satu pihak yang bekerja, melainkan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk upaya untuk mempermudah komunikasi antara petani dan Pemerintah Kalurahan adalah dengan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok seperti Gapoktan, KWT, dan kelompok tani lainnya. Melalui kelompok-kelompok tersebut, pemerintah dapat menampung aspirasi, keluhan, serta kebutuhan petani secara lebih terarah dan terorganisir. Seperti yang disampaikan oleh Suwarna selaku ketua BPKal Girikerto yang mana dia menjelaskan bahwa;

“Kan kita ada wadah-wadah di setiap lembaga kalurahan, salah satunya adalah UMKM, Gapoktan, KWT. Nah, di situ lah wadah-wadah untuk petani. Dari situ nanti program-program apa yang mereka usulkan ke kalurahan bisa kita pantau atau lihat, dan nanti kita akan mengusulkan ke kalurahan bersama dengan lurah dalam musyawarah kalurahan.” (hasil wawancara 25 april 2025)

Selain itu adapun pendapat yang disampaikan oleh Dwi Prastiwi S.H selaku dukuh yang ada di Kalurahan Girikerto yang mana dia juga menjelaskan bahwa;

“Untuk komunikasi, arahan, atau apapun itu, pertama pasti lewat dukuh, karena untuk jembatan pemerintah, patokannya adalah dukuh. Setelah itu, ada namanya kelompok tani. Jadi, melalui wadah ini kita komunikasikan apa sih kendala dari pertanian yang ada dan apa sih yang dibutuhkan. Nah, dari situ, karena dari pemerintah saat ini, ketika ingin pengajuan apapun itu, kita harus melalui wadah kelompok.”(hasil wawancara 25 april 2025)

Namun, meskipun upaya komunikasi telah dilakukan oleh pemerintah, kenyataannya belum semua petani terlibat secara aktif dalam proses komunikasi tersebut. Hanya sebagian petani, terutama yang tergabung dalam kelompok tani atau memiliki akses langsung ke perangkat kalurahan, yang rutin berinteraksi dan menyampaikan aspirasinya. Sementara itu, petani yang tidak tergabung dalam kelompok sering kali belum mendapatkan ruang yang

sama dalam menyuarakan kebutuhan dan permasalahannya. Seperti yang disampaikan oleh Rohit selaku petani yang tidak tergabung dalam kelompok yang mana dia menjelaskan ;

“Saya ini petani salak, tapi nggak ikut kelompok tani. Jadi kadang kalau ada bantuan atau informasi dari pemerintah, saya nggak tahu. Kalau nggak nanya-nanya sendiri ya nggak dikasih tahu. Pemerintah desa juga jarang ngajak ngobrol langsung petani kecil seperti saya.” (hasil wawancara 20 april 2025)

Disamping itu adapun penjelasan yang di sampaikan oleh Suroso selaku petani yang tidak ikut tergabung dalam kelompok yang mana dia menyampaikan

“Setau saya, nggak ada forum komunikasi antara kalurahan untuk kami yang tidak tergabung dalam kelompok tani.” (hasil wawancara 21 april 2025)

Penjelasan yang disampaikan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani hampir serupa dengan pengalaman dan pandangan petani lainnya yang mengalami kondisi yang sama. Hampir seluruh petani yang tidak terdaftar dalam kelompok tani mengungkapkan kekurangan yang sama, yaitu sulitnya mendapatkan akses terhadap berbagai bentuk bantuan, informasi, serta fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kalurahan. Ketimpangan partisipasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar komitmen terhadap perlindungan petani benar-benar menjangkau seluruh lapisan, tanpa terkecuali.

Dengan demikian meskipun pemerintah kalurahan telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian, pada kenyataannya belum semua petani merasakan manfaat dari komitmen tersebut. Secara formal, berbagai program telah dirancang untuk menunjang keberlangsungan pertanian, seperti penyaluran bantuan pupuk, bibit, pelatihan, serta akses

terhadap pasar. Namun, dalam implementasinya di lapangan, bantuan dan program tersebut cenderung hanya dirasakan oleh sebagian kecil petani, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok-kelompok formal lainnya.

Petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani sering kali merasa tertinggal dan tidak mendapatkan akses informasi yang memadai. Mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak diundang dalam pelatihan, serta jarang mengetahui adanya program bantuan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa program-program pemerintah hanya berpihak kepada kelompok tertentu, dan tidak menjangkau seluruh petani secara merata. Kondisi ini tentu memunculkan ketimpangan di tengah masyarakat tani, di mana sebagian merasa diperhatikan sementara yang lain merasa diabaikan.

Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah mekanisme distribusi program yang berbasis pada struktur kelompok. Pemerintah kalurahan lebih mudah menyalurkan bantuan melalui kelompok tani karena dianggap sebagai representasi resmi dari petani. Melalui kelompok, data petani dapat dikumpulkan dengan lebih rapi, dan bantuan pun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Namun, pendekatan ini belum menjawab persoalan inklusivitas, terutama bagi petani yang karena alasan tertentu memilih untuk tidak bergabung atau belum tergabung dalam kelompok tani. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani, terlihat bahwa mereka yang tidak masuk dalam kelompok tani merasa tidak memiliki akses untuk menyuarakan kebutuhan atau keluhan mereka.

Dari hasil wawancara serta observasi, terlihat bahwa upaya Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam memproteksi petani salak sudah dijalankan melalui berbagai bentuk program bantuan, pelatihan, dan kerja sama dengan berbagai pihak, namun belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh petani. Masih ada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan karenanya belum terjangkau oleh berbagai program yang tersedia. Minimnya regulasi khusus mengindikasikan bahwa sistem perlindungan belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial artinya sebagian saja atau tidak menyeluruh. Tidak salah kalau masih banyak permasalahan yang dirasakan oleh semua petani yang ada di girikerto yang mana antara lain keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah akibat tidak tergabung dalam kelompok tani, belum adanya regulasi yang melindungi harga dan wilayah tanam salak, serta lemahnya regenerasi petani karena generasi muda kurang tertarik bertani. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan saat panen raya karena harga salak sering anjlok.

Untuk itu Dalam kaitannya dengan proteksi terhadap petani salak di Kalurahan Girikerto, konsep proteksionisme yang mengedepankan peran pemerintah dalam memberikan regulasi dan kontrol terhadap sektor pertanian, terutama melalui kebijakan distribusi bantuan dan perlindungan harga, dapat dilihat sebagai suatu bentuk implementasi dari prinsip tersebut. Seperti halnya dalam teori merkantilisme yang menganggap penting peran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kekayaan negara, pemerintah Kalurahan Girikerto juga berperan dalam memberikan bantuan dan

memfasilitasi kelompok tani agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, meskipun ada berbagai bentuk proteksi melalui dana desa dan pemberian bibit serta alat-alat pertanian, kenyataannya, masalah harga yang fluktuatif, akses yang terbatas bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, serta kurangnya regulasi yang lebih spesifik terkait pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian, menunjukkan bahwa implementasi proteksi yang ada belum optimal. Proteksi yang ada cenderung bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh lapisan petani. Sebagian besar bantuan dan program lebih terfokus pada petani yang tergabung dalam kelompok tani, sementara petani mandiri atau yang tidak tergabung dalam kelompok sering kali tidak mendapat akses yang sama terhadap bantuan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkapkan beberapa poin penting mengenai perlindungan petani di Kalurahan Girikerto. Pertama, belum ada peraturan khusus dari Pemerintah Kalurahan Girikerto yang secara langsung melindungi petani. Pemerintah setempat masih mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, seperti peraturan menteri pertanian dan peraturan daerah. Kedua, upaya distribusi sumber daya seperti pemberian bibit, pelatihan teknis, dan penguatan kelompok tani sudah berjalan, namun pelaksanaannya masih terbatas. Bantuan ini belum menjangkau semua petani, terutama mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani sehingga tidak merasakan manfaatnya. Ketiga, meskipun Pemerintah Kalurahan Girikerto telah menunjukkan komitmennya dengan mengadakan musyawarah dan forum terkait pertanian yang melibatkan petani, forum-forum ini hanya mengundang petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok pertanian tertentu. Petani di luar kelompok tersebut tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam melindungi petani masih belum maksimal. Perhatian dan bantuan cenderung lebih banyak diberikan kepada petani yang menjadi anggota kelompok tertentu. Akibatnya, belum tercipta keadilan dalam penanganan masalah pertanian dan

juga belum terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh petani di wilayah tersebut.

## B. Saran

Melihat kondisi di atas, maka disarankan agar Pemerintah Kalurahan Girikerto segera menyusun regulasi lokal yang bersifat protektif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Regulasi tersebut dapat berupa Peraturan Kalurahan (Perkal) yang mengatur distribusi bantuan pertanian, perlindungan harga hasil pertanian, serta perlindungan lahan dari alih fungsi yang tidak terkontrol. Regulasi ini penting untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program-program yang berpihak kepada petani.

Pemerintah kalurahan juga perlu memperluas jangkauan program bantuan dan pendampingan kepada petani-petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Hal ini dapat dilakukan melalui pendataan yang lebih komprehensif dan membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh warga petani. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi bantuan dan akses terhadap program pertanian dapat tercapai secara merata. Lebih lanjut, perlu ada upaya konkret dari pemerintah kalurahan dalam mendorong regenerasi petani muda. Hal ini bisa ditempuh melalui penyelenggaraan pelatihan teknologi pertanian modern, pemberian insentif khusus bagi pemuda yang ingin bertani, serta menciptakan iklim pertanian yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Regenerasi petani penting dilakukan agar keberlanjutan sektor pertanian di Kalurahan Girikerto tetap terjaga di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Ahmar, M., & Parawangi, A. (2016). Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120-136.
- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23-31.
- Aminah, S., Sumardjo, Lubis, D., & Susanto, D. (2015). Strategi peningkatan keberdayaan petani kecil menuju ketahanan pangan. *Sosiohumaniora*, 18(3), 253-261.
- Anggela, N. L. (2024, Agustus 8). Terungkap! Ini alasan jumlah petani di RI semakin berkurang. *Bisnis.com*. Diakses 28 Februari 2025, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240808/99/1789332/terungkap-ini-alasan-jumlah-petani-di-ri-semakin-berkurang>
- Bakry, U. S. (2016). Metode penelitian kualitatif eksplanatif. *Jurnal Metodologi Ilmiah*, 8(3), 17-19.
- Dailami, N., & Sartika, D. (2024). Pengaruh model pembelajaran Problem-Based Learning terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi. *Journal of Education Research*, 5(2), 2186-2189.
- Eko, S. (2021). Membuat ulang ilmu pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(1), 1-19.
- Farid, M. M. (2022). Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 66-76.
- Fiantika, F.R. (2022). 1.6 Tujuan Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 12 .

- Hakim, A. (2018). Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani mandiri kelapa sawit di Kecamatan Segah. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 3(2), 31-32.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nurfadillah, N., Anisah, S., Safitri, S. N., & Hendra, J. (2025). Proteksi perdagangan di era globalisasi: Tantangan dan peluang dalam sistem ekonomi modern. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 132-140.
- Prasetiawan, T. (2024). Memantik minat petani milenial. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*.
- Rantau, M. I., Putra, H. P., & Hilman, H. (2022). Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (Studi kasus: Perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Banten). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(1), 17-28.
- Sari, L. (2019). Analisis pendapatan petani padi di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar*.
- Sari, N. P. A. A., Suwecawangsa, A. P., & Parameswari, A. A. I. (2013). Proteksionisme Uni Eropa terhadap impor panel surya Tiongkok tahun 2013. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*.
- Sardjono, A. (2010). Hak-hak petani dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 7(2), 4-10.
- Setiawan, E. (2009). Sistem budidaya tanaman lokal dan kesejahteraan petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(1), 79-88.
- Siboro, R. H. (2022). Peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. *Universitas Medan Area*.

- Eko, S. (Ed.). (2018). *Tata kelola pembangunan desa*. Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Fitria, E. A., Utama, A. D., Suhendra, D., Harahap, E. J., Karina, I., Aisyah, S., ... & Rahman, A. (2024). *Pertanian berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Imanullah, M. N. (2017). *Petani dalam perdagangan pangan internasional*. ASA GRAFIKA.
- Salsabila, D. (2025, Januari 13). Fokus penelitian: Pengertian, cara menentukan, dan contohnya. *Penerbit Deepublish Jakarta*.
- Silalahi, U. (2009). *Metode penelitian sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-90.

## **Panduan Wawancara**

Nama Informan : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Usia : .....

Tingkat Pendidikan : .....

Jenis Kelamin : .....

Tanggal Wawancara : .....

---

### **Daftar Pertanyaan**

Untuk Pemerintah Kalurahan:

1. Apa saja Prodak-prodak hukum atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kalurahan terhadap petani?
2. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada petani selama ini?
3. Apa saja komitemen pemerintah terhadap petani?
4. Apa saja forum-forum yang sudah dibuat pemerintah dengan petani dalam menyelesaikan isu-isu mengenai permasalahan pertanian?
5. Apakah pemerintah kalurahan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurus pertanian di Kalurahan Girikerto?

Untuk Petani:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap profesi petani?
2. Apa permasalahan yang Bapak/Ibu rasakan atau alami dalam pertanian?
3. Apa saja yang Bapak/Ibu sudah dapatkan dari bentuk bantuan dari pemerintah Kalurahan?
4. Apa yang bapak/Ibu harapkan dari pemerintah Kalurahan?
5. Apakah petani sering berdiskusi dengan pemerintah kalurahan tentang masalah pertanian?
6. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki agar pertanian di Girikerto bisa dikatakan maju?

## Dokumentasi



Foto Bersama Lurah Girikerto pasca wawancara



Foto Bersama Carik Girikerto Pasca Wawancara



**Foto Bersama Ulu-Ulu Pasca Wawancara**



**Foto Bersama Ketua BPKal Pasca Wawancara**



**Foto Bersama Dukuh Pasca Wawancara**



**Foto Bersama Pengurus Gapoktan Pasca wawancara**



**Foto Bersama Ketua Kelompok Tani Pasca Wawancara**



**Foto Bersama Para Petani Di Kalurahan Girikerto Pasca Wawancara**

## LAMPIRAN SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 069/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi  
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Maria Goreti Delta Pawan
No. Mahasiswa	:	21520062
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



## LAMPIRAN SURAT TUGAS PENELITIAN



### YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG  
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### SURAT TUGAS Nomor : 123/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Geronsio Gracello Ada  
Nomor Mahasiswa : 21520101  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
b. Sasaran : Pemerintah Kalurahan dalam Memroteksi Petani  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 10 April 2025



#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian,  
mohon surat tugas ini diserahkan kepada  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat  
Desa "APMD" Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat  
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa  
tersebut telah melaksanakan penelitian.

## LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



### YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKAL  
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKAL  
PROGRAM STUDI ILMI PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKAL  
PROGRAM STUDI ILMI PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKAL

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 233/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Geronsio Gracello Ada  
No Mhs : 21520101  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pemerintah Kalurahan dalam Memproteksi Petani  
Tempat : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 April 2025  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
N.I.Y. 170 230 190

## LAMPIRAN SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON TURI

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO

ଭେଦ ଭାଷ୍ୟକୀୟ ନୃତ୍ୟ ଚାନ୍ଦାଳ

Alamat : Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman, 55551

Telp: 0851-7155-1948

email : [desa.girikertoku@gmail.com](mailto:desa.girikertoku@gmail.com) & [desagirikerto@slemanreg.go.id](mailto:desagirikerto@slemanreg.go.id)

web : [www.girikerto.slemanreg.go.id](http://www.girikerto.slemanreg.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/59/GK/IV/2025

- Dasar : 1. Surat Edaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).  
2. Surat edaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Nomor 423.4/10 Bappeda/2020 tentang Kuliah Kerja Nyata .  
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktek Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta nomor 233/I/U/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Krisna Cahyana, S.H.  
Jabatan : Carki Girikerto

### MENERANGKAN :

Nama	:	Geronsio Gracello Ada
NIM	:	21520101
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Instansi/ Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	:	Jl. Timoho No 317 Yogyakarta
Keterangan	:	Memberikan izin Penelitian di Kalurahan Girikerto
Judul Tugas Akhir	:	Pemerinta Kalurahan dalam Memproteksi Petani
Lokasi	:	Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman
Waktu	:	April-Juni 2025.

#### Dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melapor kepada Dukuh setempat
2. Wajib menjaga ketertiban dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Lurah
4. Tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan,
5. Tidak dibenarkan untuk mengadakan pemasaran
6. Surat keterangan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Girikerto  
Pada tanggal 16 April 2025



Krisna Cahyana, S.H.